



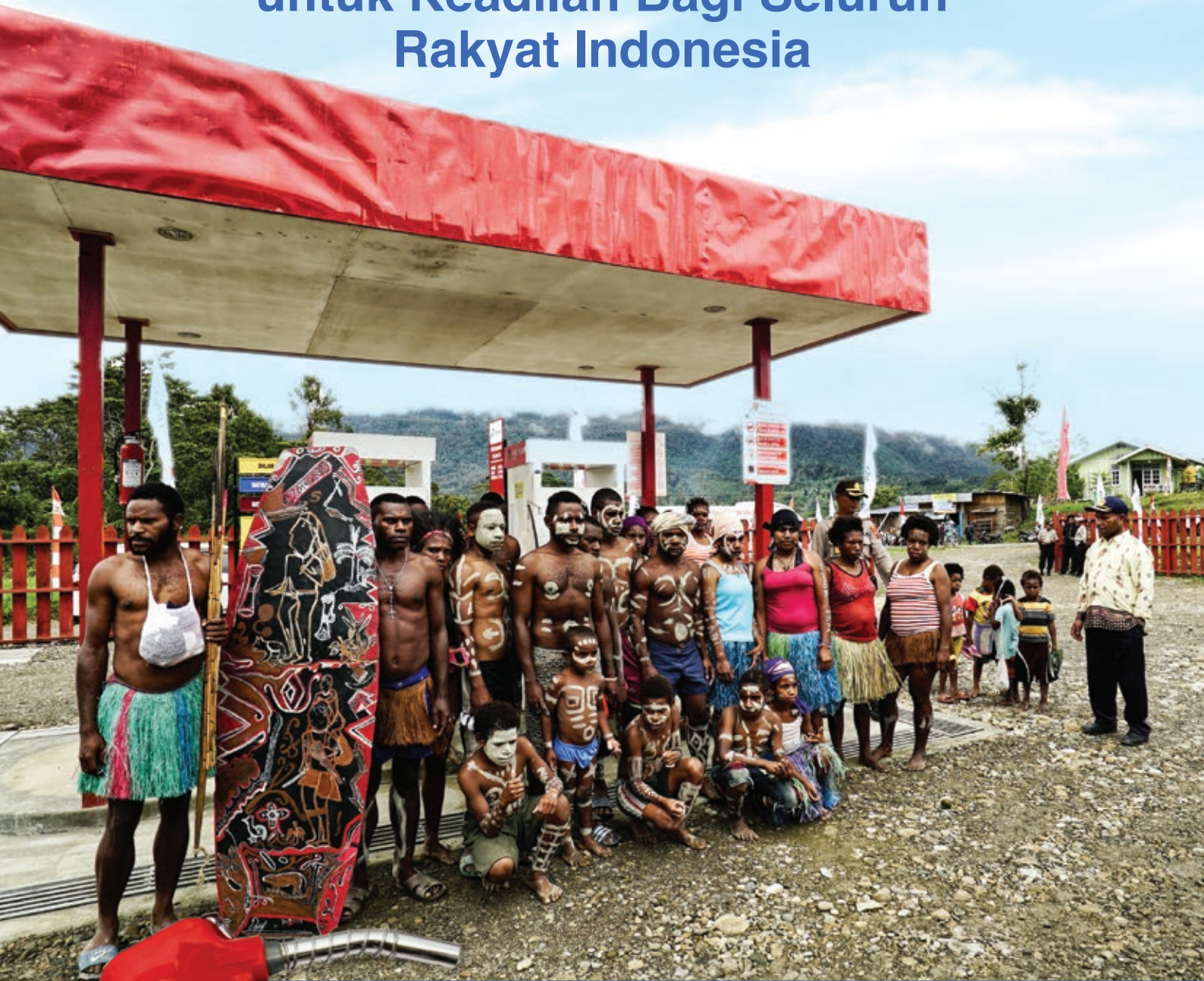
AN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
MINYAK DAN GAS BUMI



Perketat Pengawasan	6 >>	[sajian utama] Pererat Sinergi, Tingkatkan Pengawasan
BBM Bersubsidi	20 >>	[beranda] Diperlukan, Penanganan Cepat Pasca Bencana
	32 >>	[beranda] Penundaan Kenaikan Harga BBM Demi Menjaga Laju Inflasi

BBM Satu Harga

untuk Keadilan Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia



Dalam rangka menegakkan asas keadilan, saat ini daerah terpencil pun sudah dapat menikmati harga BBM yang sama seperti di kota pada umumnya.



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id

Diterbitkan oleh

Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi

Pembina

Kepala BPH Migas

Pengarah

Komite BPH Migas

Pimpinan Umum

Sekretaris BPH Migas

Redaktur Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Pimpinan Redaksi

Ady Mulyawan R.

Wakil Pimpinan Redaksi

Daman

Redaksi Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Redaksi

I Ketut Gede Aryawan,
Idham Baridwan,
I Gusti Suarnaya Sidemen,
Bukhori Muslim, Anwar Rofiq,
Ayi Endan Harir, Muhammad
Rum Budi S., Dedy Wijaya

Editor

Narcicy Makalew, H Joko Kristadi,
Bagja Ramahtullah, Yosef G,
Dian Puspitasari

Peliputan

Sugianto, Miqdad Ali Akbar, Indra

Desain Grafis

Okto Berbudi, Yogi

Dokumentasi

Ade Mahendra, Imam Sofyan

Sirkulasi

Erna Sulastinah, Asas

e-mail

humas@bphmigas.go.id

website

www.bphmigas.go.id



Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi

Disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi masih menjadi tantangan besar untuk segera dicarikan solusi. Pasalnya, disparitas harga dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Disparitas harga antara solar bersubsidi dan non subsidi, misalnya, masih terlihat, yakni bisa mencapai Rp5.000 per liter. Solar bersubsidi digunakan untuk angkutan umum dan mobil pribadi, sedangkan non subsidi digunakan oleh industri, seperti perkebunan dan pertambangan.

Oleh sebab itu, sesuai dengan fungsinya, BPH Migas senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Namun, BPH Migas tak sendiri. Sinergi dan koordinasi lintas instansi diperlukan guna menekan terjadinya praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hal ini karena sumber daya manusia di BPH Migas masih terbatas.

Sinergi ini, contohnya, terlihat dari kesepakatan antara BPH Migas dan Polri. Pengawasan dari Polri dibutuhkan untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran dan tidak diselewangkan.

Banyak potensi penyimpangan dalam distribusi BBM karena ada disparitas harga bahan bakar bersubsidi dan nonsubsidi. Potensi penyimpangan tersebut rawan terjadi saat distribusi BBM dari depot ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Oleh karena itu, pengawasan Polri di daerah dapat mencegah penyelewangan distribusi BBM.

Pemanfaatan teknologi juga bisa diterapkan guna menekan penyalahgunaan BBM secara lebih luas lagi. Bersama *stakeholder* lainnya, BPH Migas telah menguji coba penyaluran BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan teknologi digital. Perangkat tersebut dipasang mulai dari tangki penyimpanan BBM di SPBU sampai kran penyaluran BBM (*nozzle*) di dispenser. Dengan teknologi ini, data penyaluran BBM bersubsidi dan non subsidi akan lebih akurat. Selain itu, pembayaran subsidi Pemerintah ke Badan Usaha akan lebih tepat seiring dengan keakuratan data penyaluran BBM bersubsidi.

Sinergi seperti beberapa contoh di atas inilah yang perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Semua ini semata-mata guna mewujudkan energi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Isi



06-07

[sajian utama]
Pererat Sinergi,
Tingkatkan Pengawasan

BPH Migas tak mengendurkan semangat dalam pengawasan BBM bersubsidi. Pengawasan terus dilakukan, bahkan ditingkatkan. Sinergi dengan *stakeholder* lain pun tak dikesampingkan.

6 [sajian utama]
Pererat Sinergi, Tingkatkan Pengawasan

8 Berangus Penyelundupan Solar

10 Cegah Penyelewengan, Digitalisasi *Nozzle* SPBU akan Diberlakukan

12 [galeri foto Hilir Migas]

16 [berita foto]

18 [beranda]
BBM Satu Harga ke-83 Hadir di Maybrat, Papua Barat

20 Diperlukan, Penanganan Cepat Pasca Bencana

22 Skema KPBU Percepat Pembangunan Jargas

24 Pacu Ekonomi, BBM Satu Harga Harus Tepat Sasaran

28 Bersinergi Demi Dorong Terbentuknya Sub Penyalur BBM

32 [sorot]
Penundaan Kenaikan Harga BBM Demi Menjaga Laju Inflasi

34 BPH Migas Tindak Tegas SPBU yang Rugikan Konsumen

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan **Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.**

Kirimkan ke:

Redaksional Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : redaksi@bphmigas.go.id
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656



10-11

[sajian utama]
Cegah Penyelewengan, Digitalisasi Nozzle SPBU Akan Diberlakukan

Penyelewengan BBM bersubsidi masih menjadi 'PR' yang harus dibenahi. Pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat menjadi salah satu solusinya.



20-21

[beranda]
Diperlukan, Penanganan Cepat Pasca Bencana

Indonesia sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami karena terletak di kawasan "cincin api". Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia mengeluarkan dana besar dari APBN atau menerima bantuan luarnegeri untuk mempercepat proses pemulihan bencana alam.



32-33

[sorot]
Penundaan Kenaikan Harga BBM Demi Menjaga Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahun ke tahun (September 2018 terhadap September 2017) sebesar 2,88% atau masih di bawah target Pemerintah untuk keseluruhan tahun ini sebesar 3,5%.

- 36 [ragam]**
 Mengoptimalkan Pemanfaatan Data Konsumsi
- 38 [lensa]**
 Tambah Lagi, Tiga Titik Penyalur Program BBM Satu Harga Resmi Beroperasi
- Persiapkan Pedoman Kewajiban Iuran, BPH Migas Gelar *Public Hearing*
- BPH Migas Adakan Serangkaian *Achievement Motivation*
- BPH Migas Gelar Serangkaian Sosialisasi Perpres 43 Tahun 2018
- Sinergikan Kebijakan, BPH Migas Gelar *Public Hearing* Perubahan Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012
- BPH Migas Gelar Diskusi Penyelesaian Sengketa di Bidang Hilir Migas
- Teluk Bintuni Jadi Titik BBM Satu Harga ke-14 di Papua

- BPH Migas dan Kepolisian RI Jalin Kerjasama
- Kini, Giliran Masyarakat Kabupaten Lamandau Rasakan BBM Satu Harga
- Titik BBM Satu Harga ke-69 Hadir di Lalan
- BBM Satu Harga Hadir di Katingan
- Giliran Masyarakat Gorontalo Utara Nikmati BBM Satu Harga
- Penandatanganan Digitalisasi Nozzle SPBU
- BPH Migas mengecek dan memastikan ketersediaan BBM di Lombok, Nusa Tenggara Barat
- BPH Migas Gelar *Workshop* Kesiapan Infrastruktur Hilir Gas Bumi
- BPH Migas Pantau Ketersediaan dan Pendistribusian BBM Pasca Musibah Gempa Lombok

- Penyaluran BBM Bersubsidi Capai 66,2%
- Respon Cepat BPH Migas Pantau Kondisi Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Palu dan Donggala
- BPH Migas Evaluasi Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang
- Permintaan Gas Menjadi Tantangan Terbesar Dalam Bisnis Gas
- BPH Migas Imbau Pemda Percepat Perizinan BBM Satu Harga
- BPH Migas Segera Gelar Pra Tender untuk Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Pengangkutan Gas dan Wilayah Niaga Tertentu (WNT)
- BPH Migas Masih Kaji Perubahan Desain Pipa Gas Bakrie di Kalimantan

Pererat Sinergi, Tingkatkan Pengawasan

BPH Migas tak mengendurkan semangat dalam pengawasan BBM bersubsidi. Pengawasan terus dilakukan, bahkan ditingkatkan. Sinergi dengan stakeholder lain pun tak dikesampingkan.



Hal ini tercermin dalam perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara BPH Migas dengan Polri dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman dilakukan antara Kapolri Tito Karnavian, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa. Tujuan MoU ini untuk meningkatkan sinergi dalam rangka bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sebelumnya, Polri bersama SKK Migas dan BPH Migas telah meneken MoU bernomor P/JN-0176/SKKO0000/2013/SO dan Nomor B/27/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada kegiatan usaha Hulu minyak dan Gas Bumi.

Berlaku hingga 2023

Dirunut ke belakang lagi, Amien menyampaikan bahwa kerja sama Badan Pengelola Hulu Migas dan Polri telah terjalin sejak 2004. Kerja sama BPH Migas dan Polri telah terjalin sejak 2013. Dengan MoU ini, perpanjangan kerja sama ketiga institusi tersebut akan berlaku hingga 2023.

Perpanjangan nota kesepahaman itu merupakan perpanjangan yang keempat kali. Dari MoU tersebut sudah terlaksana 14 kerja sama khusus dengan kepolisian daerah untuk mengamankan wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Namun, gangguan sektor hulu migas masih terjadi sampai saat ini.

"Hari ini kita melaksanakan MoU yang sangat penting meskipun ini adalah perpanjangan MoU sebelumnya dan sudah habis dan kita perpanjang sampai 2023," ujar Kapolri Tito Karnavian dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Perpanjangan MoU tersebut di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/9).

Tito menyatakan, sektor energi sangat penting bagi ketahanan suatu bangsa Indonesia.

"BBM merupakan masalah mendasar bagi bangsa Indonesia, karena memiliki hubungan langsung ekonomi rumah tangga dan industri," kata Tito.

Menurut Tito, merujuk pada MoU tersebut, bakal disusun sebuah pedoman kerja bersama untuk mengatur teknis pelaksanaannya.

"Memerlukan turunan lebih teknis, namun kita memang menyadari bahwa MoU ini bukan hanya sekadar tanda tangan ceremonial perlu follow up, karena sangat mendasar bagi bangsa," kata Tito.

BBM Satu Harga rawan penyimpangan

Salah satu tujuan kerja sama BPH Migas dan Polri tersebut ialah sebagai langkah menyukseskan program BBM Satu Harga yang pada 2019 ditargetkan mencapai 150 titik lokasi.

"BBM Satu Harga dicanangkan kepada Presiden, itu diminta dikawal dan diamankan oleh BPH Migas untuk mengawal," ujar Fanshurullah Asa.

BBM Satu Harga merupakan kebijakan menyeragamkan harga jual resmi BBM jenis Premium sebesar Rp6.450 per liter dan Solar Rp5.150 per liter hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia.

Hingga kini, Fanshurullah menyebutkan, BBM Satu Harga sudah terealisasi di 82 titik daerah terpencil. Tanpa pengawasan, distribusi BBM Satu harga ke daerah terpencil ini rawan penyimpangan.

"Ketika dari depot masuk ke SPBU, itu banyak sekali peluang penyimpangan. Apakah itu melalui kapal, atau mobil tangki dan sebagainya," imbuhnya.

Berbagai ancaman keamanan yang terjadi meliputi kegiatan ilegal migas

berupa penyalahgunaan BBM bersubsidi, pengoplosan, pembelian dengan jeriken/modifikasi tangki, dan takaran BBM yang kurang akurat.

BPH Migas mengaku tak bisa berjalan sendiri. Pihaknya mesti membuka kerja sama utamanya dalam keamanan. Misalnya saja, Fanshurullah mencontohkan seperti penyelundupan BBM di Sumsel lewat kapal belum lama ini.

"BPH Migas punya keterbatasan SDM, dan hanya ada di Pusat. Jadi kami sangat membutuhkan bantuan khususnya dari kawan-kawan kepolisian yang memiliki personel hingga di daerah-daerah. Baik di desa-desa, kecamatan, dan seterusnya," lanjutnya.

Adapun hal-hal yang menjadi MoU antara BPH Migas dengan kepolisian, meliputi tukar menukar data dan informasi, pengawasan, pemberian kesadaran hukum, pengamanan penegakkan hukum, hingga peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia.

"Kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun," pungkasnya.

300 lebih gangguan

Para kontraktor minyak dan gas bumi masih menghadapi banyak gangguan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Gangguan itu berupa pencurian peralatan, pencurian minyak mentah, penutupan jalan, penghentian operasi kontraktor, perusakan material, dan lainnya.

Oleh karena itu, dua badan pengelola migas-SKK Migas dan BPH Migas-menggendong aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pengamanan dalam aktivitas hulu dan hilir migas.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, langkah tersebut dilakukan karena saat ini distribusi BBM dan keamanan di wilayah kerja migas masih mengalami banyak gangguan. Untuk masalah keamanan, saat ini ada 328 gangguan dan keamanan di wilayah hulu migas.

"Seperti pencurian migas pengeboran liar, demonstrasi, itu masih banyak," katanya.

Amien mengatakan jika pengawasan tidak diperketat, pencurian minyak bisa berpotensi merugikan keuangan negara.

Kerugian tersebut sebenarnya sudah bisa terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini.

"Neraca pembayaran kita yang defisit tersebut salah satunya karena masalah itu," katanya.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menyampaikan, MoU yang dibuat pertengahan September lalu ini merupakan perpanjangan kerja sama. Sebelumnya, 2013 sampai 2018 ini, BPH Migas telah melakukan kerja sama serupa.

Dalam kerja sama tersebut, pihaknya dan Polri sudah berhasil mengungkap 3.051 kasus pencurian minyak. Dari kasus yang terungkap tersebut, ada 17,5 juta liter yang berhasil dielamatkan.

"Dengan kata lain, nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Rp150 miliar," katanya.

Tiga poin utama

Pengawasan dari Polri diperlukan untuk menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif sehingga tidak memengaruhi iklim investigasi di hulu dan hilir migas. Tito Karnavian menambahkan, setelah penandatanganan MoU, pihaknya akan langsung bekerja menjaga keamanan distribusi BBM. Ia juga mengatakan, kerja sama dengan SKK Migas dan BPH Migas tersebut melingkupi tiga poin utama.

Pertama, Polri akan melakukan kegiatan preemtif seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan hulu dan hilir migas, sehingga aktivitas di sektor tersebut mendapat dukungan publik.

Kedua, pengamanan objek hulu dan hilir yang dianggap penting dijaga secara fisik oleh anggota Polri.

Ketiga, penegakan hukum bila terjadi pelanggaran, penyalahgunaan, dan gangguan di sektor hulu dan hilir migas.

"Pemerintah berusaha tingkatkan produksi migas. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan kompleks dari hulu dan hilir, dari eksplorasi, produksi, sampai distribusi," ungkapnya.

Tito menambahkan, rantai bisnis migas dari hulu sampai hilir yang relatif panjang itu perlu dukungan dari Polri khususnya di bidang keamanan. ★



Berangus

Penyelundupan Solar

Sejumlah kasus penyelewengan Solar masih dijumpai. Tak tanggung-tanggung, selain kuantitasnya berjumlah besar, beberapa kasus tersebut melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.

Salah satu kasus penyelewengan Solar yang belum lama ini terungkap terjadi di Tuban, Jawa Timur. Terungkapnya penyelewengan BBM bersubsidi ini setelah petugas memeriksa dan menangkap Tangki BBM PT BPE milik seorang warga di Desa Sowan. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Posmat Tuban untuk diidentifikasi awal dengan hasil bahwa Solar diperoleh dari pengepul atas nama seseorang asal desa setempat.

Pengepul tersebut mengambil atau membeli Solar Subsidi dilangsir dengan menggunakan beberapa kendaraan Tossa dari tiga SPBU, yaitu SPBU Bulu, SPBU Bancar, dan SPBU Tambakboyo, dengan intensitas pembelian Solar 16 ton setiap lima hari.

Usut tuntas

Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein meminta Kepolisian Resort (Polres) Tuban untuk mengusut tuntas praktik dugaan penyelewengan Solar bersubsidi ke industri yang tertangkap tangan Pangkalan TNI AL (Lanal) di Desa Sowan, Kecamatan Bancar. Usaha yang diduga ilegal tersebut harus diberangus supaya tak lagi merugikan masyarakat, khususnya nelayan.

"Kami minta polisi mengusutnya," ujar Wabup Noor Nahar, Selasa (31/7).

la khawatir jika penyelewengan ini tak diberangus, maka akan banyak pihak pengguna Solar bersubsidi yang dirugikan, terutama nelayan. Dikaji secara regulasi, pengusaha nakal tersebut sudah melanggar.

"Selisih Solar bersubsidi dan nonsubsidi sampai Rp3.000/liter," jelasnya.

Seorang anggota Polres Purworejo diduga terlibat dan menjadi otak aksi penyimpangan Solar ilegal yang dilakukan di tengah laut. Hal itu terungkap dalam operasi digelar oleh Tim Mabes Polri dan Direktorat Polair Polda Jawa Tengah.

Di tempat terpisah, Anggota Polisi di Polres Purworejo, Jawa Tengah diduga terlibat penyelewengan Solar. Hal ini bermula saat pada patroli gabungan, petugas memergoki sebuah kapal kayu yang mengangkut puluhan drum berisi sepuluh ton Solar.

Saat diperiksa, Anak Buah Kapal (ABK) tak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen muatan barang, dan justru mengatakan kapal tersebut adalah milik oknum polisi yang dimaksud.

"Kami curiga karena kapal ini kok bawa banyak drum. Kami periksa, ternyata tidak ada dokumen dan drum itu isinya Solar yang jumlahnya sepuluh ton. Saat kami tanya, katanya ini kapal milik TG. Akhirnya, kapal kami amankan dan kita dalam kasusnya," kata Direktur Polisi Air (Polair) Polda Jateng Kombes Polisi Andreas Kusmaedi medio Agustus lalu.

Dari hasil penyelidikan sementara, sepuluh ton Solar di dalam kapal disebut milik Bripta TG tersebut didapat dari aksi 'kencing' kapal-kapal besar di tengah laut, yang kemudian akan dijual ke nelayan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. "Penyelidikan sementara, Solar itu dari kapal di tengah laut yang 'kencing' keluar Solarnya, terus diterima pelaku dan kemudian dijual ke nelayan. Kita teruskan dengan memeriksa para ABK dan Bripta TG yang sebelumnya pernah tugas di Polair sini. Mungkin ini sudah dijalankan TG sejak tugas di sini," tambah Andreas.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono menyatakan akan menindak tegas bila ada anak buahnya yang terbukti terlibat aksi penyimpangan Solar ilegal tersebut. Condro bahkan tak segan-segan untuk memberikan sanksi hingga ke pemecatan.

"Sudah jelas aturannya, kita tidak mentolerir ada anggota Polri terlibat kejahatan. Jika nanti terbukti benar, akan kami tindak lanjuti ke proses hukum dan prosedur internal meski sanksinya harus sampai pemecatan," kata Condro.

Dua faktor

Sementara itu, BPH Migas mengungkapkan, ada dua penyebab masih terjadinya aksi penyelundupan Solar di sejumlah daerah. Menurut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, salah satu penyebabnya yaitu akibat disparitas harga antara Solar bersubsidi dan Solar industri.

Saat ini, kata Fanshurullah, harga Solar bersubsidi per liternya yaitu Rp5.150. Sementara harga Solar non-subsidi untuk industri dijual Rp9.500 per liter. Sehingga, ada disparitas harga sebesar Rp4.350.



subsidi ke industri," kata dia di Jakarta, Rabu (29/8).

Penyebab kedua, kata Fanshurullah, yaitu titik serah BBM bersubsidi seperti Solar yang hanya diatur sampai depot, bukan hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU. Ketentuan soal distribusi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Jadi potensi penyimpangan BBM dari Depot ke SPBU bisa terjadi," kata dia.

Kabar soal penyelundupan Solar ini kembali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai rapat koordinasi penanganan migas ilegal di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/8). Praktik penyelundupan, kata dia, terjadi mulai dari proses pengeboran, pengolahan hingga ke tahap pengangkutan Solar.

Untuk menghentikan praktik ini, Wiranto pun telah membentuk satuan tugas khusus penanganan migas ilegal. Fanshurullah mengatakan, BPH Migas akan terlibat dalam satgas ini, khusus untuk penanganan penyelundupan di sektor hilir. "Satgas ini melibatkan semua stakeholder," ujarnya.

Terakhir, BPH Migas meminta Pertamina mempercepat pemasangan ujung keran bensin atau *nozzle* digital di 5.518 SPBU di seluruh Indonesia. *Nozzle* ini akan

terhubung secara *online* dan mengirimkan data penyaluran bensin secara tepat waktu. Sehingga, penyaluran jutaan kiloliter Solar di seluruh wilayah bisa terpantau secara ketat.

Perpanjangan kerjasama

Fanshurullah Asa mengatakan, pengawalan dari Polri dibutuhkan untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak tepat sasaran dan tidak diselewengkan. Maka, BPH Migas pun menggandeng Polri untuk pengawasan kegiatan hulu dan hilir migas.

Sejak kerja sama tersebut terjalin hingga Agustus 2018, sebanyak 3.051 kasus penyimpangan di sektor hilir migas berhasil ditangani oleh Polri. Dari jumlah kasus tersebut, terdapat barang bukti dengan total 16,74 juta liter BBM yang diselewengkan.

"Nilai estimasi pengamanan uang negara setidaknya Rp150 miliar," ujar Fanshurullah dalam acara perpanjangan kerja sama SKK Migas dan BPH Migas bersama dengan Polri, Senin (17/9).

Kerja sama BPH Migas dan SKK Migas dengan Polri itu akan berlaku sama 2023. Dia menyebutkan bahwa banyak potensi penyimpangan dalam distribusi BBM karena ada disparitas harga bahan bakar bersubsidi dan nonsubsidi.

Potensi penyimpangan tersebut rawan terjadi saat distribusi BBM dari depot ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Oleh karena itu, pengawasan Polri di daerah dapat mencegah penyelewengan distribusi bahan bakar minyak. Pasalnya, sumber daya manusia di BPH Migas masih terbatas.

"Tahun depan subsidi [Solar] menjadi Rp2000 per liter. Dengan jumlah BBM subsidi [Solar] sebanyak 15,6 juta kiloliter [pada 2019] ada Rp35 triliun dana APBN amanat rakyat yang mesti Polri jaga agar tepat sasaran," katanya.

Perpanjangan nota kesepahaman itu merupakan perpanjangan yang keempat kali. Dari MoU tersebut sudah terlaksana 14 kerja sama khusus dengan kepolisian daerah untuk mengamankan wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Namun, gangguan sektor hulu migas masih terjadi sampai saat ini. ★



Cegah Penyelewengan, Digitalisasi *Nozzle* SPBU akan Diberlakukan

Penyelewengan BBM bersubsidi masih menjadi 'PR' yang harus dibenahi. Pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat menjadi salah satu solusinya.

Pemanfaatan teknologi yang dimaksud adalah digitalisasi pada keran penyaluran (*nozzle*) BBM bersubsidi. Anggota Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar mengatakan, selain mempermudah pencatatan distribusi BBM, keberadaan *nozzle* digital juga dipandang mengurangi tingkat penyalahgunaan BBM di lapangan.

"Kemarin masih manual, dengan digitalisasi ini, SPBU sekarang bisa dimonitor berapa penyalurannya, khususnya BBM. Berapa sekian SPBU menyalurkan BBM, begitu," tutur dia, Selasa (18/9).

Dari akarnya

Ibnu melanjutkan, digitalisasi SPBU juga dapat menekan aksi penyelewengan BBM. Ini terutama oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengkomersilkan BBM untuk kepentingan bisnis.

"Jadi, kita bisa monitoring BBM bersubsidi ini. Penyelewengan banyak. Penyelewengan BBM subsidi ini nanti masuknya ke industri atau ke pertambangan," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Ibnu, BPH Migas memangkas praktik itu dimulai dari akarnya, yakni SPBU.

"BBM subsidi dari SPBU, makanya kita perkuat SPBU ini dengan digitalisasi," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwijoyo mengatakan, uji coba perangkat tersebut telah lebih dulu dilakukan sejak awal tahun ini di 10 SPBU. Menurutnya, Pertamina telah menyepakati untuk menerapkan teknologi pada penyaluran BBM.

"Pertamina tidak punya kapabilitas untuk semua seluruh Indonesia. makanya kita gandeng Telkom untuk menyelesaikan 5.18 SPBU. Best effort, akhir tahun 2018

seluruh Indonesia," kata Saryono dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (13/8).

Saryono menerangkan, setiap liter BBM yang mengucur dari *nozzle* akan terdeteksi alat khusus dan langsung tercatat dalam sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Telkom. Perangkat pencatatan khusus itu akan dipasang rata-rata di setiap SPBU sebanyak 13 *nozzle*.

"Dengan program ini, data penyaluran BBM subsidi dan non-subsidi akan lebih akurat. Selain itu, pembayaran subsidi pemerintah ke Pertamina akan lebih tepat seiring dengan keakuratan data penyaluran BBM subsidi. Harapannya, supaya pada waktu verifikasi pendataan dan pengendalian BBM berjalan dengan baik," ujarnya.

Di tempat yang sama, *Vice President Retail Fuel Marketing* Pertamina, Jumali mengungkapkan, program ini mengurangi potensi kehilangan (*losses*) dalam penyaluran BBM. Selain itu memudahkan Pertamina dalam menganalisa bila terjadi kendala dalam penyaluran BBM.

Senior Vice President Corporate ICT Pertamina Jeffrey Tjahja Indra menambahkan, digitalisasi memudahkan Pertamina dalam menentukan jenis BBM yang diminati masyarakat. Dengan begitu maka proses penyaluran lebih akurat.

"Selain untuk memantau kebutuhan subsidi, ini akan kami manfaatkan untuk pemantauan non subsidi," ujarnya.

Direktur Enterprise and Business Telkom Dian Rachmawan menyatakan, pihaknya belum bisa membeberkan nilai investasi dalam penerapan digitalisasi di SPBU. Pasalnya, Telkom dan Pertamina masih melakukan perhitungan bersama termasuk mekanisme pembayaran dari Pertamina ke Telkom terkait penerapan program tersebut. Rencananya dalam beberapa hari ke depan ada perumusan anggaran, konsep bisnis serta modalnya bagaimana.

"Digitalisasi ini sinergi BUMN. Apa yang disebut tadi 5.518 SPBU sampai akhir Desember selesai, kami akan melihat berapa SPBU yang diselesaikan satu hari. Kami punya plasma seluruh Indonesia, pekerjaan ini berat menantang kami akan melakukan secepat mungkin," ujarnya.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, nantinya dengan sistem tersebut akan lebih terintegrasikan. Terutama untuk melihat siapa saja yang membeli BBM bersubsidi. Hal ini membantu dalam hal pengawasan dan transparansi data.

"Ini road map besar dari segi pengembangan sektor ESDM. Kita rutin menerima pelaporan. *Nozzle* untuk mengetahui angka-angka yang dilaporkan. Dengan digital akan membantu dua pihak," katanya.

Komitmen tiga menteri

Program digitalisasi *nozzle* pompa BBM yang akan diterapkan di berbagai SPBU di tanah air merupakan komitmen tiga menteri jajaran Kabinet Kerja.

"Ini komitmen tiga menteri yaitu Ignasius Jonan (Menteri ESDM), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan saya sendiri (Menteri BUMN)," kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam acara penandatanganan perjanjian

kerja sama Pertamina-Telkom Indonesia di Jakarta, Kamis (30/8).

Menurut Rini, digitalisasi merupakan hal yang penting karena seringkali dihadapi kondisi kelangkaan BBM karena cara penyimpanan stok BBM yang tidak membuat diperolehnya data yang akurat.

Menteri BUMN menegaskan bahwa bila suatu keputusan diperoleh berdasarkan data "sampah", maka hasilnya juga akan berupa keputusan "sampah".

Namun, lanjutnya, bila data yang dipegang setiap hari adalah akurat maka juga bisa ditentukan stok Pertamina secara tepat, sehingga stok yang ada dapat dijaga agar jangan sampai kekurangan atau kelebihan.

"Untuk *nozzle* segera dibuatkan *nozzle real time* untuk mengurangi penyalahgunaan BBM dan mengawasi konsumsi premium hingga ke masyarakat," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Rabu (15/8).

Beda dengan RFID

Sebelumnya, Pertamina juga telah menggagas penggunaan teknologi digital dalam kegiatan serupa, dengan menggunakan *Radio Frequency Identification*

(RFID). Menurut *Vice President Retail Fuel Marketing* Pertamina Jumali, konsep penggunaan teknologi digital berupa RFID untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi pada kendaraan.

Alat pembatas tersebut berupa ring besi yang ditempel pada mulut tangki bahan bakar mobil dan *nozzle* sehingga ketika konsumsi BBM bersubsidi sudah melebihi batas yang ditentukan, maka *nozzle* tidak mengeluarkan BBM bersubsidi.

"Konsepnya berbeda dengan PT Inti yang memasang RFID, kalau RFID kita mempertemukan ring yang dipasang di *nozzle* dan di mobil, jadi saling ketemu," kata Jumali di Jakarta, Selasa (21/8).

Jumali menambahkan, sistem teknologi digital baru yang akan dipasang, bertujuan untuk mencatat konsumsi BBM bersubsidi agar jauh lebih akurat.

Teknologi digital tersebut berupa sensor yang dipasang pada tangki pendam BBM di SPBU bersubsidi dan *nozzle* penyalur BBM ke tangki kendaraan.

"Ini tidak seperti RFID, kita pasang perangkat di dispenser untuk mencatat, sehingga dengan teknologi ini lebih visibel," tutur dia.

Jumali menuturkan, program RFID yang sempat digalakkan Pertamina, dengan tujuan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi saat ini telah dihentikan. "Sudah tidak berlaku lagi (program RFID)," ujar dia.

"Sebelum ada digitalisasi ini, kami melakukan pelaporan tiap bulanan, lalu kami lakukan uji petik dari angka dari laporan badan usaha, terjun ke lapangan untuk verifikasi volume. Pengumpulan data ini kan butuh waktu. Harapannya dengan adanya digitalisasi ini sangat membantu dua belah pihak untuk memverifikasi," ujar Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjojo.

Sistem kerja digitalisasi, imbuh Saryono, pada prinsipnya akan dilakukan konversi dari jumlah liter yang disalurkan jadi format elektronik.

Format ini dikirim ke satu pusat data, dari seluruh 5.518 SPBU tersebut. Setelah itu, data akan dibuat laporan dan analisis yang membantu BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. ★





galeri foto **Hilir Migas**



Rapat Kerja Komisi VII DPR RI
6 september 2018



Kunjungan Tim BPH Migas ke Palu pasca bencana
memantau ketersediaan BBM



★ Peringatan hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke 73



galeri foto **Hilir Migas**



★ Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional yang bertempat di Kubu Raya, Kalimantan Barat.



★ Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional yang bertempat di Atambuea Provinsi Nusa Tenggara Timur.



★ | Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga di Prabumulih



★ | Peresmian BBM 1 Harga ke-82 SPBKB 30.3.1.019 Dusun Sepengah, Kec Air Besar, Kab Landak, Prov Kalimantan Barat



Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 di Kepanjen, Kabupaten Malang

Dalam rangka mensosialisasikan tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengatur dan mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM, BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 pada tanggal 13 Oktober bertempat di Kepanjen, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.



BBM Satu Harga Hadir di Kabupaten Nias

Nias - Program BBM Satu Harga menjadi perhatian khusus Pemerintah agar masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) bisa merasakan harga BBM yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah dalam rangka pemerataan dan asas keadilan. Kebijakan BBM Satu Harga tertuang pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.



Resmikan Titik Ke-78 BBM Satu Harga, BPH Migas Pastikan Masyarakat Suoh Dapat Menikmati Keadilan BBM

Bandar Negeri Suoh – Hari ini (26/10), dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT dan JBKP Secara Nasional, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa meresmikan titik ke - 78 penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.



Sosialisasi Sub Penyalur dalam rangka percepatan BBM Satu Harga Secara Nasional di Kabupaten Timika.

BPH Migas menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sub Penyalur dalam rangka percepatan BBM Satu Harga Secara Nasional di Kabupaten Timika. Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Masyarakat, Pemda, Polres Timika, Kodim dan stakeholder terkait



Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional di Gorontalo

BPH Migas menggelar acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional yang bertempat di Hotel Maqna Gorontalo. Pada acara ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas, Sumihar Panjaitan dan Hari Pratoyo, Anggota Komisi VII DPR RI, Bapak Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo, Syukri Botutihe, Kepala Biro Hukum KESDM yang dalam hal ini diwakili oleh Muhidin, Gubernur Gorontalo yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo, Syukri Botutihe, Bupati Gorontalo Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Thamrin Yusuf, Bupati Gorontalo yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Bapak Daniel Rantellinggi, GM PT Pertamina (Persero) MOR VII yang dalam hal ini diwakili oleh *Marketing Branch Manager* Wilayah Sulutenggo, Daniel Alhabsy.



Public Sharing Perubahan Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012

Public sharing membahas tentang perubahan peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dibuka oleh Komite BPH Migas, Pak Saryono Hadiwidjoyo mewakili Kepala BPH Migas. Narasumber dari Komite BPH Migas Ibnu Fajar, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.





Program BBM Satu Harga telah menyentuh titik ke-83. Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa meresmikan BBM Satu Harga ke-83 itu di SPBU Kompak 86.984.14 Distrik Ayamaru Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (1/11).

BBM Satu Harga ke-83

Hadir di Maybrat, Papua Barat

BBM Satu Harga adalah bukti begitu besarnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakatnya. Terlebih, pembangunan SPBU Kompak di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan terluar), seperti di Maybrat ini, bukan merupakan hal yang mudah mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu dipastikan tepat sasaran peruntukannya.

Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat agar penyaluran BBM Satu Harga tepat sasaran. Terkait hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016, BPH Migas ditugasi untuk mengawal agar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan harga yang sama.

Sebelum adanya SPBU Kompak di Maybrat, penduduk setempat harus membeli Premium dan Solar sebesar Rp10.000/liter. Kini, dengan hadirnya SPBU Kompak di sana, warga Kabupaten Maybrat bisa menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa, yakni Premium Rp6.450/liter dan Solar Rp5.150/liter.

Fanshurullah Asa mengatakan, BPH Migas bertanggung jawab terhadap perwujudan tiga keadilan, yaitu keadilan ketersediaan, keadilan distribusi dan keadilan harga di bidang hilir migas.

"Kami berharap dengan terbangunnya SPBU Kompak Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, khususnya di Distrik Ayamaru," ucapnya.



Secara nasional, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 akan dibangun 160 Penyalur BBM Satu harga. Pada tahun 2017, telah terbangun 57 Penyalur BBM Satu Harga dengan rincian 54 Penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan tiga Penyalur oleh PT AKR Corporindo, Tbk. Untuk tahun ini, target Penyalur BBM Satu Harga sebanyak 73 penyalur dengan rincian 67 penyalur oleh Pertamina dan enam penyalur oleh AKR.

Dengan diresmikannya SPBU Kompak di Maybrat, maka telah hadir 83 penyalur BBM Satu Harga dengan rincian 78 penyalur oleh Pertamina dan empat penyalur oleh AKR. Penyalur BBM satu harga target tahun 2018 yang belum diresmikan, namun telah beroperasi sebanyak 34 penyalur oleh Pertamina dan satu penyalur oleh AKR. Pada tahun 2019, ditargetkan 29 penyalur beroperasi oleh Pertamina dan satu penyalur oleh AKR.



Diperlukan, Penanganan Cepat Pasca Bencana



Indonesia sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami karena terletak di kawasan “cincin api”. Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia mengeluarkan dana besar dari APBN atau menerima bantuan luar negeri untuk mempercepat proses pemulihan bencana alam.

Mitigasi bencana penting tidak hanya untuk manusia, namun juga infrastruktur. Maka, aspek teknis dan finansial mesti diperhatikan. Sebagai negara rawan bencana, mitigasi penting dilakukan agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana tidak hanya bergantung kepada APBN.

Memonitor

Oleh sebab itu, penanganan pasca bencana juga tak kalah penting untuk mengetahui sejauh mana kerusakan infrastruktur akibat bencana tersebut. Seperti pada Selasa (7/8), Tim BPH Migas tiba di Lombok dan mengecek TBBM yang menyalurkan BBM ke seluruh penyalur di seluruh Pulau Lombok. Kedatangan Tim BPH Migas hanya dua hari pasca gempa melanda Lombok.

Berikut data yang diperoleh dari Tim BPH Migas:

- Stok Premium 5.900KL dengan ketahanan stok 8,2 hari.
- Stok Solar 5.902 KL dengan ketahanan stok 8,7 hari
- Stok Pertamina 5.820 KL dengan ketahanan stok 18,3 hari

- Stok Avtur 1.434 KL dengan ketahanan stok 9 hari
- Stok Pertamina dex 230 KL dengan ketahanan stok 46 hari

Salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana gempa bumi adalah Kecamatan Pemenang dan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Di wilayah tersebut untuk mendapatkan BBM masyarakat dilayani oleh SPBU 54.833.05. Terminal BBM Ampenan telah mengirimkan BBM ke SPBU 54.833.05 untuk Premium sebesar 8 KL dan Solar sebesar 8 KL.

Keesokan harinya, laporan Tim BPH Migas mencatat:

- SPBU 54.833.05, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara masih belum teraliri jaringan listrik, namun SPBU ini sudah mulai beroperasi sejak pukul 17.30 WITA dengan menggunakan Genset yang berasal dari SPBU yang lain.
- SPBU 54.833.12, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara sudah mulai beroperasi dan menyalurkan BBM Premium dan Peralite sejak pukul 16.22 WITA .

Kondisi ketersediaan BBM (stok) di Lombok per 8 Agustus 2018:

- Stok BBM per 8 Agustus 2018 di TBBM Ampenan masih dalam kondisi aman, dengan rincian :
1. Premium dengan coverage days 7 hari
 2. Solar dengan coverage days 7,1 hari
 3. Pertamina dengan coverage days 17,3 hari
 4. Pertamina Dex dengan coverage days 44,2 hari
 5. Avtur dengan coverage days 7,8 hari

BPH Migas akan terus berusaha memonitoring lokasi-lokasi yang terkena dampak gempa bumi di Lombok agar masyarakat tetap terpenuhi kecukupan BBM dan tercapainya energi berkeadilan.

Mempercepat

Begitu pula saat gempa dan tsunami melanda Palu dan berbagai wilayah sekitar lainnya di Sulawesi, Jumat (28/9). Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa yang memimpin langsung Tim BPH Migas telah melakukan peninjauan lokasi dalam rangka memantau dan memastikan ketersediaan dan pendistribusian BBM di Palu dan Donggala pasca bencana gempa bumi dan tsunami.

Koordinasi pendistribusian BBM dengan PT Pertamina (Persero) maupun PT AKR Corporindo dan badan usaha lainnya dilakukan untuk mempercepat proses revitalisasi infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM bagi masyarakat Palu, Donggala dan sekitarnya yang terkena dampak bencana.

Sejumlah infrastruktur energi, termasuk TBBM Donggala mengalami kerusakan pasca gempa bumi dan tsunami sehingga pendistribusian BBM sempat terhambat dan dikerjakan manual. Akibatnya terjadi banyak antrian masyarakat di beberapa SPBU untuk mengisi BBM dengan menggunakan jerigen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pembelian dan pengisian BBM melalui jerigen memiliki resiko tinggi, oleh karena itu terhitung Senin 8 Oktober 2018 BPH Migas meminta masyarakat tidak membeli BBM menggunakan jerigen dengan alasan:

- BBM yang ada di SPBU adalah diperuntukkan untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 serta kendaraan berplat kuning.
- BBM adalah bahan bakar yang mudah terbakar sehingga dapat menimbulkan kebakaran apabila masyarakat membeli dengan menggunakan jerigen dan atau media lain seperti drum di SPBU.
- BBM yang ada di SPBU adalah diperuntukkan kepada konsumen akhir dan tidak dapat diperjual belikan kembali.
- Pasal 18 ayat (2) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM melarang masyarakat menimbun dan atau mengumpulkan BBM dari SPBU.
- Larangan penggunaan jerigen untuk pembelian BBM telah diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penjualan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.

Selanjutnya mengacu pada Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02/MoU/KABPH/2018 dan Nomor: B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 terkait Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, BPH Migas meminta bantuan pihak Kepolisian di daerah Kota Palu dan Donggala agar melakukan tindakan preemptive, preventif,

dan tindakan hukum apabila sangat diperlukan.

Kondisi hingga saat ini di Kota Palu, Donggala dan sekitarnya dilaporkan sudah cukup kondusif, dengan sudah beroperasinya 15 dari 17 SPBU di Kota Palu, 3 dari 4 SPBU di Kabupaten Donggala, dan 1 dari 2 SPBU di Sigi untuk melayani masyarakat sekitar. Pertamina pun menyiapkan 41 dispenser *portable* dan 10 mobil dispenser yang siap untuk melayani masyarakat. Tentunya Pemerintah melalui Tim BPH Migas dan Kementerian ESDM menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam membeli BBM karena stok BBM yang ada dipastikan aman karena BPH Migas akan terus mengoptimalkan perbaikan dalam mengembalikan dan menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM bagi masyarakat.

BPH Migas terus berkoordinasi dengan Pertamina dan lembaga-lembaga lainnya untuk terus mengusahakan yang terbaik terkait penyediaan dan pendistribusian dalam tahap pemulihan pasca bencana.

BPH Migas juga sudah mengirimkan 20 orang yang ditugaskan untuk bertugas di empat Kabupaten/kota antara lain Palu, Donggala, Sigi serta Boutong untuk membantu pengendalian kelancaran suplai BBM dan logistik lainnya sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018. Tim BPH ini akan bergantian dengan tim selanjutnya hingga penugasan dua bulan ke depan. ★



Skema KPBU

Percepat Pembangunan Jargas

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas) telah berlangsung sejak beberapa tahun silam. Sudah banyak warga yang telah teraliri jargas. Meski begitu, pembangunan jargas masih bisa dioptimalkan lagi. Salah satu caranya dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Lebih cepat

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mendorong agar pembangunan jargas menggunakan skema KPBU. Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan jargas daripada hanya mengandalkan dana APBN.

"Kalau konsepnya menggunakan APBN itu akan lama sekali tercapai. Kita harapkan dengan skema KPBU, maka ini bisa cepat prosesnya," ujar pria yang akrab disapa Ifan ini di Bali, Kamis (30/8).

KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) kepada badan

usaha pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Menurut Ifan, dalam RPJMN Tahun 2015–2019 ditargetkan 1,2 juta rumah tersambung jargas. Namun, hingga saat ini realisasinya masih jauh dari target.

"Ternyata dari 1,2 juta sambungan rumah dalam RPJMN 2015–2019, baru yang terealisasi di bawah 300.000. Itu padahal ada dalam RPJMN 2015–2029, itu amanah nawacita," kata Ifan.

Menurut Ifan, jargas cukup strategis guna menekan impor elpiji di tengah kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai

tukar rupiah. "Ini kan bisa mengurangi impor elpiji yang mungkin capai 60 % total yang dikeluarkan, ini kan mengurangi juga penggunaan BBM," ucap dia.

443.505 SR

Pembangunan jargas merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dengan tujuan memenuhi kebutuhan energi yang murah, bersih, ramah lingkungan, dan efisien. Bahkan, pemanfaatan jargas mendapat perhatian utama dari Presiden sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017.





Pembangunan jargas saat ini masih cukup rendah. Pemerintah mencatat pembangunan jargas melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan menggunakan dana APBN hingga akhir tahun 2018 baru mencapai 443.505 SR.

Tahun depan, Pemerintah telah menganggarkan pembangunan jargas dalam APBN 2019 sebanyak 76.800 SR sehingga sampai akhir tahun 2019, total jargas yang rencananya akan dibangun baru mencapai 520.305 SR.

Jika anggaran pembangunan jargas ditambah sebesar 200.000 SR pada tahun depan, maka total pembangunan jargas hingga akhir 2019 bisa mencapai 643.505 SR. Jika pemerintah konsisten untuk membangun jargas 200.000 SR setiap tahun pada 2020-2023 maka target 1 juta SR jargas masih bisa tercapai. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada (2017), gas digunakan untuk ekspor (LNG) sebesar 28,49%, industri sebanyak 23,53%, listrik sebesar 13,63%, sementara serapan jargas atau city gas hanya sebesar 0,05%.

Holding migas

Guna mempercepat pembangunan jargas, Pemerintah berencana menerbitkan Perpres yang saat ini dalam tahap finalisasi. Hal ini untuk mengantisipasi pemanfaatan gas yang makin besar seiring peningkatan konsumsi masyarakat.

Draft Perpres sudah ditandatangani Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Keuangan dan hanya tinggal menunggu tanda tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Di dalam Perpres nanti akan diatur *roadmap*, berikut dengan lokasi dan pengawasan program jargas tersebut. Namun yang

diutamakan untuk jargas adalah di wilayah yang dekat dengan sumber gas.

Sementara itu, PGN menilai pembentukan holding migas akan membuat lebih banyak masyarakat menikmati jargas. Pasalnya, holding migas dapat membuat sumber gas lebih dekat menjangkau konsumen sehingga harganya akan lebih murah.

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan, holding migas dapat mengefisienkan 96 % infrastruktur. Dengan demikian, transmisi dan distribusi gas tidak akan ada tumpang tindih seperti yang terjadi selama ini.

Misalnya dalam satu proyek pipa gas yang dimiliki oleh PGN sedangkan fasilitasnya Pertagas, maka jika terjadi suatu kerusakan akan sulit mengambil tindakan. Karena itu, ketika holding migas ini terbentuk maka akan lebih optimal karena dikelola bersama-sama.

Meskipun di luar itu masih ada milik swasta walaupun persentasenya kecil. Saat ini dalam tata kelola niaga gas, pihaknya masih menunggu untuk mengembangkan jaringan di luar yang sudah ada untuk memperluas produksi gas sehingga lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami mencoba untuk menggunakan metode yang sama, rasio gasifikasi. Kita berharap bisa tumbuh, jadi makin banyak rakyat yang menggunakan gas bumi,” kata dia dalam RDP dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/7).

Saat ini, lanjutnya, harga gas di Asia Tenggara tidak ada yang di bawah US\$5 kecuali disubsidi oleh Pemerintah. Oleh karenanya, *holding* migas akan menyalurkan gas *upstream* sesuai dengan harga yang telah ditentukan Pemerintah.

Dalam menentukan harga gas ini, Pemerintah juga akan menghitung

keuntungan yang akan didapat holding migas. Dengan demikian, pihaknya tidak dapat mematok harga gas yang dijual ke masyarakat

“Jadi kita regulated. Kami akan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Kami akan efisien dan efektif, jadi gas bisa lebih terjangkau,” tuturnya.

Manfaat

Gas bumi sendiri adalah energi yang murah. Tanpa disubsidi saja, biaya untuk pemakaian gas bumi hanya separuh dari LPG.

Selain itu, sambungan gas ke rumah tangga lebih praktis. Para ibu rumah tangga tak perlu repot-repot ke warung dan menggondong tabung gas ketika gas di rumah habis. Berbeda dengan LPG, sambungan gas langsung mengalirkan gas ke rumah-rumah. Selain itu, sambungan gas rumah tangga aman dari bahaya kebakaran.

Keberadaan jargas juga telah mempermudah konsumen dalam menjalankan kebutuhan berumah tangga. Kini, para ibu-ibu tidak perlu khawatir mau masak jam berapapun karena gasnya tidak akan habis dan mengalir selama 24 jam.

Tak hanya itu, pemanfaatan gas secara langsung ini akan menghemat pengeluaran rumah tangga dibandingkan pemakaian LPG 3 kg. Dengan perhitungan, tiap rumah tangga hanya mengeluarkan sekitar Rp36 ribu per bulan jika menggunakan gas bumi. Sedangkan apabila menggunakan LPG 3 kg, diperlukan biaya Rp52–57 ribu per bulan.

Tak hanya masyarakat yang diuntungkan, negara juga memperoleh manfaat dari semakin banyaknya sambungan gas ke rumah tangga. Subsidi LPG dapat ditekan, impor LPG juga makin sedikit. Maka, uang negara bisa dihemat, devisa semakin kuat.

Pacu Ekonomi, BBM Satu Harga Harus Tepat Sasaran

Penerapan Program BBM Satu Harga dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi meski masih dirasakan dalam lingkup terbatas.

Pasalnya, titik-titik penerapan program ini menyasar daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang harga BBM sebelumnya di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan kawasan-kawasan lainnya, seperti di Pulau Jawa. Selisih harga beli ini pun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memperbaiki taraf hidup ekonominya.

Salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penerapan Program BBM Satu Harga adalah Papua. harga BBM di wilayah Papua kerap jadi sorotan lantaran lebih tinggi ketimbang harga yang berlaku di Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Namun, di era Presiden Joko Widodo, usaha untuk menerapkan BBM satu harga secara nasional pun dilakukan.

Oleh sebab itu, BPH Migas punya peran penting dan bertanggung jawab mengurus kelancaran distribusi migas ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Selain itu, BPH Migas juga mengatur dan menjamin ketersediaan migas secara nasional, termasuk mendorong impelentasi BBM satu harga di tanah air.

Anggota Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia mengatakan, BPH Migas mengatur dan menetapkan ketersediaan distribusi BBM.

"Penting sekali BPH Migas untuk menjamin distribusi BBM secara nasional," kata Lobo di Hotel Mahavira, Nabire, Papua, Sabtu (1/9).

Sisi keekonomian

Tak hanya itu saja, BPH Migas juga menjamin ketersediaan BBM dan distribusinya secara merata hingga mampu menyentuh masyarakat, terutama di daerah yang sulit terjangkau, khususnya di daerah pedalaman seperti Papua.



"Ada kurang lebih 7.000 penyalur atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang exist di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, bayangkan dari 7.000 penyalur itu, hanya 133 saja milik Pertamina, yang lainnya badan usaha biro," ujarnya.

Tentu, jumlah tersebut masih jauh dari optimal. Apalagi untuk membangun SPBU baru membutuhkan investasi yang cukup besar dan itu pun tak serta merta mudah lantaran harus memperhatikan berbagai hal dan pertimbangan.

Membangun SPBU, lanjut Lobo, memang harus melihat sisi ke-ekonomiannya sebab membangun SPBU di daerah terpencil, seperti di daerah Papua sekarang ini, dianggap tidak ekonomis bagi sebuah badan usaha.

"Untuk mengisi yang kosong itu, kita isi dengan sub penyalur. Nah bagaimana kita membuat penyalur-penyulur tambahan yang legal, sehingga kita bisa membuat semuanya berkah," ucapnya.

Senada dengan Lobo, Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Nabire Aif Syarifudin, yang datang mewakili Bupati Nabire,

berharap penerapan BBM satu harga bisa berlangsung dengan lancar dan aman.

"Bagi kami masyarakat Kabupaten Nabire, kegiatan ini jadi sangat penting, yang mana agar pendistribusian BBM satu harga bisa berlangsung dengan baik, terutama di Nabire," kata Aif.

Aif mengatakan Nabire tentu butuh percepatan penerapan BBM satu harga ini. Apalagi, dari segi letak geografis Nabire sangat strategis, seperti misalnya diapit beberapa kabupaten baik dari pegunungan yang terdiri dari empat sampai lima kabupaten, kemudian ada juga di pesisir.

"Melalui kegiatan ini kami berharap agar ke depan penyaluran BBM bisa dirasakan seluruh masyarakat. Diharapkan dengan distribusi BBM secara merata, bisa meningkatkan aspek ekonomi," lanjut Aif.

Dampak positif

Kehadiran titik penyalur BBM satu harga di wilayah 3T telah terbukti membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Warga Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan, Sumatera Selatan, misalnya, bisa melakukan mobilisasi dengan lebih cepat selain

harga BBM lebih murah daripada sebelum kehadiran titik penyalur BBM satu harga di wilayahnya.

Dengan pengeluaran transportasi makin menurun, produksi mereka bisa makin meningkat sehingga denyut nadi ekonomi warga Desa Sukajadi makin bergerak cepat. Sebab, sebelum hadirnya SPBU Kompak, contohnya, penduduk Desa Sukajadi harus menempuh 55 kilometer menuju SPBU terdekat.

BBM *grade* Premium yang dijual dengan eceran, sebelum adanya SPBU Kompak Pertamina, menjadi alternatif utama konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor bagi warga Lalan. Harganya kala itu di atas harga yang ditetapkan Pemerintah.

Dermaga Sungai Lalan di Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan, menjadi tempat berlabuhnya kapal penumpang dan barang termasuk bongkar muat angkutan BBM Pertamina untuk SPBU Kompak yang khusus membutuhkan waktu hingga rata-rata 20 jam menyusuri sungai.

Penjual BBM *grade* Premium eceran sudah sejak lama menjadi penyedia alternatif bagi masyarakat pengguna transportasi





karena jauhnya jarak SPBU Pertamina dari Kecamatan Lalan.

Hadirnya SPBU Kompak BBM satu harga akan meringankan biaya konsumsi BBM kendaraan. Terlebih, moda transportasi roda dua mendominasi aktivitas masyarakat Kecamatan Lalan.

Moda transportasi ini pula yang digunakan oleh salah satu warga Lalan bernama Paimin (32). Ia menggunakan motor untuk berdagang rujak buah. Sejak menjadi warga dari keluarga transmigrasi dari Pulau Jawa, harga barang-barang di Desa Sukajadi sudah tinggi. Ia berharap, BBM satu harga bisa mengubah kehidupan sehari-harinya.

Sementara itu, Bani Idham, Pengusaha SPBU BBM Kompak Pertamina Satu Harga di Kecamatan lalan, mendedikasikan bisnis SPBU Kompaknya untuk peningkatan taraf kehidupan sosial masyarakat Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan, agar mendapatkan BBM yang terjangkau, walau ongkos produksi dan operasional SPBU-nya tinggi.

Pengawasan

Meski telah terbukti membawa dampak positif, BPH Migas juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk turut menjaga sekaligus mengawasi lembaga

penyalur BBM satu harga di wilayahnya masing-masing.

“Tolong pengawasannya karena pengawasan penting dilakukan oleh pemda. Jangan sampai BBM yang hakikatnya untuk masyarakat malah jatuh ke tangan pengusaha,” ujar Anggota Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar di Gorontalo Utara, Gorontalo, Kamis (6/8).

Menurutnya, penyaluran BBM harus sampai ke masyarakat. Pasalnya, dalam komponen Solar ada uang rakyat atau subsidi sehingga jangan sampai disalahgunakan.

“Setiap pembangunan lembaga penyalur BBM satu harga di wilayah lain, kami juga minta pemda bantu awasi. Meski begitu, BPH Migas juga melakukan pengawasan. Tapi, kami cuma ada 300 personel. Maka, tolong pengawasannya,” tutur Ibnu.

Lebih lanjut, kata dia, dalam waktu dekat akan diluncurkan Satgas Ilegal Migas yang terdiri dari Kementerian ESDM, BPH Migas, aparat, serta lainnya.

“Tujuan Satgas tersebut untuk awasi kegiatan hilir,” tegasnya. Sebelumnya, kata dia, BPH Migas telah lakukan pengawasan lewat Uji Peti.

Pengawasan yang baik akan mengakibatkan penerapan Program BBM Satu Harga tepat sasaran.

“Ini harus tepat sasaran kepada rakyat kecil, sedangkan bagi yang mampu bisa menggunakan BBM Peralite dengan harga Rp8.000 perliter,” kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa saat peresmian lembaga penyalur SPBU Kompak di Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (7/9).

Dia menjelaskan, BBM satu harga ini adalah untuk rakyat kecil, terutama di desa, guna meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program BBM satu harga, Pemerintah berkomitmen untuk terus menambah jumlah lembaga penyalur BBM di seluruh Indonesia.

Pembangunan SPBU Kompak di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bukti begitu besarnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakat di kabupaten tersebut sehingga dapat memperoleh BBM secara adil dengan harga sesuai ketetapan Pemerintah.

“Kami mengharapkan agar pemerintah kabupaten dan masyarakat Musi Banyuasin ikut serta mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM di tingkat penyalur



satu harga ini agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.

82 penyalur

Pembangunan penyalur BBM Satu Harga turut menggandeng PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo. Hingga minggu pertama September 2018, Pertamina telah mengoperasikan 77 titik BBM satu harga di beberapa wilayah Indonesia.

Pada tahun 2018, perseroan ditargetkan mengoperasikan 67 titik BBM satu harga. Sebanyak 44 titik yang belum beroperasi masih melewati proses perizinan dan pembangunan.

Berikut daftar lokasi lembaga penyalur BBM Satu Harga Pertamina yang mulai beroperasi tahun ini:

1. Seimenggaris, Nunukan , Kalimantan Utara (9 Maret)
2. Liang, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (9 Maret)
3. Banggai Tengah, Banggai Laut, Sulawesi Tengah (6 April)
4. Distrik Pirime, Lanny Jaya, Papua (6 April)
5. Wawoni Barat, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (11 June)
6. Tagulandang, Kep. Sitaro, Sulawesi Utara (29 June)
7. Distrik Fayit, Asmat, Papua (2 Juli)

8. Gido, Nias, Sumatera Utara (26 Juli)
 9. Miangas, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (30 Juli)
 10. Kep. Sula, Maluku Utara (July, 31)
 11. Belantikan Raya, Lamandau, Kalimantan Tengah (3 Agustus)
 12. Kec. Sungai Boh, Kab. Malinau, Kalimantan Utara (7 Agustus)
 13. Tolingula, Gorontalo(27 Agustus)
 14. Wamena, Jayawijaya, Papua (27 Agustus)
 15. Sabu, Sabu Raijua, NTT (29 Agustus)
 16. Bintuni, Teluk Bintuni, Papua Barat (30 Agustus)
 17. Katingan Kuala, Katingan Hulu, Kalimantan Tengah (30 Agustus)
 18. Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (30 Agustus)
 19. Borong, Manggarai Timur, NTT (30 Agustus)
 20. Bokondini, Tolikara, Papua (30 Agustus)
 21. Essang, Kab. Kep Talaud, Sulawesi Utara (4 September)
 22. Nanusa, Kab. Kep. Talaud, Sulawesi Utara (4 September)
 23. Kec. Bawolato, Nias Induk, Sumatra Utara (5 September) (agi/agi)
- Secara keseluruhan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Program BBM Satu Harga telah terealisasi di 82 titik lembaga penyalur di seluruh Indonesia hingga 19 September 2018.

Berdasarkan laporan BPH Migas, Pertamina dan AKR selaku lembaga penyalur BBM Satu Harga telah menyalurkan BBM sebanyak 69.172 kiloliter (kl) hingga 19 September 2018.

Dari jumlah volume tersebut, sebesar 44.324 kl merupakan BBM jenis Premium yang merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sementara, Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau minyak Solar telah dikonsumsi masyarakat sebesar 24.848 kl.

Pemerintah memproyeksikan volume kebutuhan BBM untuk program BBM Satu Harga hingga tahun 2019 sebesar 568 kl per hari atau 207 ribu kl per tahun. Jumlah itu terdiri dari 186 kl per hari untuk Solar dan 382 kl per hari untuk Premium.

Artinya, jika dihitung per tahun kebutuhan BBM Satu Harga mencapai 68 ribu kl untuk jenis Solar dan 139 ribu kl jenis Premium. Proyeksi ini berdasarkan pada kebutuhan BBM yang akan disalurkan oleh 160 lembaga penyalur di seluruh Indonesia. ★



Bersinergi Demi Dorong Terbentuknya Sub Penyalur BBM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 8 Ayat (2), disebutkan bahwa "Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI".

Pada ayat berikutnya Undang-undang tersebut memberikan kewajiban kepada BPH Migas untuk melakukan pengaturan dalam upaya menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, untuk itulah BPH Migas menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada wilayah yang belum terdapat Penyalur.

Koordinasi

Terkait hal ini, BPH Migas melakukan Sosialisasi peraturan tersebut di beberapa Provinsi yang memiliki wilayah yang belum terdapat Penyalur hingga akhir Tahun 2015, kemudian pada awal November 2016 BPH Migas mengundang seluruh Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten) yang telah menunjukkan minatnya untuk memudahkan masyarakat di daerahnya dalam memperoleh BBM.

BPH Migas mendorong terbentuknya sub penyalur BBM. Kehadiran sub penyalur diharapkan akan mampu mempercepat implementasi BBM satu harga secara nasional.

"Tugas kami sebenarnya memastikan bagaimana BBM itu sampai kepada masyarakat di manapun mereka berada," kata Anggota Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia belum lama ini.

BPH Migas terus mendorong tumbuhnya sub penyalur di daerah-daerah yang tergolong Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Dengan demikian, diharapkan Program BBM satu harga yang dicanangkan Pemerintah bisa diimplementasikan dengan cepat dan merata.

Untuk memastikan distribusi BBM, BPH Migas berkoordinasi langsung dengan BUMN Pertamina. Namun, untuk mewujudkan penyampaian BBM, BPH Migas juga melibatkan penyalur BBM.

"Penyalur itu istilah sebenarnya titik terang terakhir BBM kepada pengguna terakhir, bagi masyarakat, yaitu SPBU," kata Lobo.

Selain koordinasi, BPH Migas juga kerap menggelar sosialisasi ke berbagai wilayah. Salah satunya di Prabumulih, Sumatera Selatan, Rabu (3/10). Kegiatan Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa serta turut hadir pula Anggota Komisi VII DPR RI H. Yulian Gunhar dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM Satu Harga Secara Nasional juga pernah diadakan di Gorontalo yang dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dan Hari Pratoyo serta Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad.

Pontianak, Kalimantan Barat; Atambua, Nusa Tenggara Timur; adalah dua tempat lainnya yang menjadi tuan rumah Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM Satu Harga Secara Nasional.

Saat sosialisasi di Pontianak, Selasa (4/9), Fanshurullah Asa membuka secara langsung rangkaian acara panel yang diisi oleh beberapa narasumber antara lain Anggota Komisi VII DPR RI Katherine Angela Oendoen dan Komite BPH Migas Henry Ahmad.

Dalam sambutannya, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, kegiatan ini harus disertakan dengan *coaching* kepada para *stakeholder* yang memang sungguh sungguh untuk membangun Sub Penyalur di Indonesia.

Hal ini pula yang terlihat saat Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM Satu Harga Secara Nasional di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Selasa (14/8).

Pada kegiatan sosialisasi kali ini, BPH Migas menggandeng Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Christy Barend serta Pertamina, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membahas, menginformasikan, dan mengedukasi masyarakat Saumlaki tentang sub penyalur



BBM sebagai perpanjangan tangan penyalur Program BBM Satu Harga yang diselenggarakan secara nasional.

Dalam kesempatan itu, Lobo Balia mengatakan, "Bahwa Sub Penyalur berbicara tentang bagaimana menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah di Indonesia, khususnya untuk daerah Indonesia Timur".

Lobo meneruskan, masih belum meratanya infrastruktur penyalur di Indonesia dihadapkan dengan kenyataan bahwa penyalur secara khusus di Maluku Tenggara Barat ini terdapat lima penyalur (tiga SPBU Reguler, satu SPBU Kompak, satu SPBUN dan angka ini dirasa masih sangat kurang yang berimbas pada ketersediaan dan pendistribusian BBM di Maluku menjadi dasar BPH Migas untuk menyelenggarakan sosialisasi ini.

Salah satu masyarakat yang ditemui pada kegiatan ini, Lita Tamain menegaskan bahwa dirinya mengapresiasi terkait kegiatan sosialisasi ini karena dirasa sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah yang jauh dari tangan Pemerintah Pusat karena masyarakat jadi tahu terkait dengan apa itu Program BBM Satu Harga dan apa itu sub penyalur BBM dan bagaimana cara untuk membangunnya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

BPH Migas akan terus menjembatani kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang migas tidak hanya di Saumlaki. Namun, di beberapa daerah lain di seluruh wilayah Indonesia melalui kegiatan sosialisasi sub penyalur ini karena sub penyalur BBM sebagai perpanjangan tangan dari Program BBM Satu Harga akan membantu dan mempercepat pemerataan energi, khususnya BBM bagi masyarakat dari daerah terluar, tertinggal, dan terdepan untuk terus mengamalkan sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya keadilan pada bidang energi.

100 sub penyalur

BPH Migas menargetkan akan membangun sedikitnya 100 sub penyalur BBM di 25 Provinsi diberbagai wilayah di Indonesia. Hal ini, menjadi strategi pemerintah untuk membenahi semakin menjamurnya Pertamina diberbagai wilayah padahal tidak memiliki izin sebagai pengecer.

Anggota Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar mengatakan, harus ada strategi khusus dari Pemerintah untuk mengatasi menjamurnya Pertamina tersebut. Saat ini, menurutnya pemerintah sudah berhasil membangun sekitar 40 sub penyalur baru di delapan provinsi di Indonesia.

"Sudah cukup banyak ya target kita tahun ini ada di 25 Provinsi. Nah ini yang sudah berjalan sekitar delapan provinsi ada sekitar 40 sub penyalur. Target tahun ini, kita akan bangun sekitar 100 sub penyalur sampai akhir tahun di seluruh Indonesia," katanya di Jakarta, Sabtu (13/8).

Ibnu menambahkan, untuk membenahi menjamurnya Pertamina yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebab selain tidak memiliki izin sebagai pengecer. Pertamina juga mengabaikan berbagai masalah, seperti jarak lokasi Pertamina dan unsur safety serta takaran yang benar.

la beralasan, jika dilihat dari sisi *safety* Pertamina walaupun menggunakan dispenser, namun dispenser Pertamina belum memenuhi unsur *safety*. Sebab Pemerintah memiliki standar sendiri mengenai dispenser BBM. Dispenser BBM harus melalui sertifikasi dari Direktorat Teknik Migas dan dari Meteorologi.

"Tadi sudah saya jelaskan bahwa Pertamina ini diluar kewenangan BPH Migas karena dia tidak memiliki izin. Walaupun begitu kegiatan Pertamina ini oleh masyarakat harus dibenahi dengan program-program yang dikeluarkan BPH Migas, seperti sub penyalur kemudian nanti ada lagi penyalur mini," tambahnya.

Melalui program sub penyalur dan rencana meluncurkan penyalur mini. Diharapkan bisa membenahi menjamurnya Pertamina tapi tidak serta merta melarang Pertamina beroperasi.

"Ke depan akan kita luncurkan program seperti itu sehingga yang sudah berusaha tetap berusaha. Kita legalkan dengan aturan yang akan kita buat kedepan," tegasnya.

Syarat

Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad mengatakan, sub penyalur akan didirikan di daerah yang tidak terdapat penyalur dengan jarak minimal 5 kilometer dari

APMS terdekat dan 10 kilometer dari SPBU terdekat.

"Penyaluran masih sangat terbatas di daerah. Harapan kita sub penyalur ini mendukung percepatan BBM satu harga," ujar Henry di Pontianak, Selasa (4/8).

Henry mengatakan, idealnya setiap penyalur dapat menyuplai BBM untuk 6.000 orang. Sementara itu, di Kalimantan Barat, rasionya 280 penyalur berbanding 5 juta penduduk.

Oleh karena itu BPH Migas berharap kelompok masyarakat setempat memiliki kemauan menjadi sub penyalur agar BBM subsidi mudah terjangkau dan harganya tidak melonjak tinggi. Adapun persyaratan pra implementasi sub penyalur yakni dikeluarkannya surat keputusan Bupati yang menetapkan tim penunjang sub penyalur, besaran volume dan ongkos angkut dari penyalur ke sub penyalur, serta standarisasi teknis peralatan sub penyalur.

Jika ingin menjadi sub penyalur, berikut persyaratan yang harus dipenuhi:

- Memiliki kegiatan usaha atau unit usaha.
- Lokasi memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan.
- Memiliki tempat penyimpanan BBM maksimal 3.000 liter.
- Memiliki dan menguasai alat angkut BBM.
- Memiliki peralatan penyaluran yang sesuai standar teknis.
- Memiliki izin lokasi dari pemda.
- Jarak minimal 10 kilometer dari SPBU dan 5 kilometer dari APMS.

Syarat lain yang harus dipenuhi yakni berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan BBM yang disalurkan. Sub penyalur hanya boleh menyalurkan BBM ke anggota unit usahanya.

Efektif, efisien, dan transparan

Sementara itu, di tempat terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Yudi Kotouky menjelaskan bahwa industri migas punya peran penting dalam mendukung energi nasional.

Maka dari itu harus dikelola secara profesional dan transparan sehingga mampu memberikan ketersediaan BBM kepada masyarakat Indonesia dengan adil. Ke depannya, Yudi berharap kehadiran

sub penyalur yang sedang dibangun ini, bisa memberikan dampak positif dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM, khususnya masyarakat Papua.

Sebab, selain mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, juga menjamin ketersediaan energi.

“Migas harus dikelola secara efektif, efisien dan transparan sesuai dengan salah satu nawacita Presiden Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggiran sesuai ketentuan daerah-daerah,” kata Yudi.

Menurut Yudi, sub penyalur diyakini mampu membantu pemerintah mewujudkan program membangun Indonesia dari pinggir. Apalagi, sebagian besar daerah yang disasar oleh program sub penyalur ini, lebih banyak di daerah pinggiran dan perbatasan, daerah dengan kategori terpencil, terdepan, dan terluar (3T).

“Diharapkan nantinya terbentuk sub penyalur penyalur lainnya di wilayah NKRI, khususnya Papua dan Nabire. Kita harapkan juga penyaluran bbm bisa sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Yudi.

Tak jauh berbeda dengan Yudi, Kasubdit Pengatur Distribusi BBM BPH Migas Luluk Priambudi mengungkapkan bahwa implementasi sub penyalur BBM dilakukan dalam rangka mendukung percepatan BBM satu harga dalam agenda nasional Pemerintah.

Apalagi, lanjut Luluk, keberadaan SPBU di Papua masih belum optimal, lantaran jaraknya masih terlalu jauh. Misalnya saja di daerah Jawa, yang jarak antara penyalur (SPBU) dengan penyalur lainnya sudah di bawah 10 kilometer.

Sementara di wilayah Sumatera sendiri jaraknya masih berkisar di level 200 kilometer. Untuk wilayah timur Indonesia masih sangat memperhatikan, sebab jarak antara satu penyalur dengan penyalur lainnya mencapai 2.300 kilometer.

“Jarak yang terlalu jauh tersebut, menyisakan berbagai masalah, seperti rawan disalahgunakan dan akses yang masih sulit terjangkau,” ujarnya.

Karena jarak yang tak cukup ideal tersebut, tambahna, tak heran harga BBM melambung tinggi menjadi Rp25.000 per liternya di daerah yang jauh dari SPBU penyalur, karena harus menanggung ongkos distribusi. Bahkan sebelum

Pemerintah mengulirkan program BBM satu harga, harga BBM jenis premium melampaui angka Rp50.000 per liternya.

Luluk menjelaskan bahwa BPH Migas akan bekerja keras dalam memberikan akses energi kepada masyarakat di pelosok-pelosok daerah di Indonesia, khususnya di pedalaman Papua.

“Terbukti saat ini sudah ada 16 sub penyalur yang terbangun dan tahun ini sudah ada sedikitnya 230 sub penyalur yang sudah mengajukan izin ke BPH Migas. Banyak sekali, yang sudah existing 16 sub penyalur di 25 provinsi target 230-an di seluruh Indonesia. Di Papua baru ada dua,” ucapnya.

Melalui program sub penyalur tersebut, menurut Lobo Balia, distribusi BBM bisa ditekan dan jauh lebih efisien. Tak hanya itu saja, seharusnya distribusi itu juga bisa menjangkau masyarakat hingga ke daerah yang sulit terjangkau oleh SPBU yang ada.

“Biaya distribusinya bisa ditekan. Itu filosofi yang kita anut dari program sub penyalur ini, di mana biaya distribusinya rendah namun tidak membebani masyarakat. Karena dalam UU Migas pemerintah wajib menjaga ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI,” ucapnya. ★



Penundaan Kenaikan Harga BBM Demi Menjaga Laju Inflasi



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahun ke tahun (September 2018 terhadap September 2017) sebesar 2,88% atau masih di bawah target Pemerintah untuk keseluruhan tahun ini sebesar 3,5%.

Vemang, laju inflasi Indonesia masih di bawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah. Besarnya inflasi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Konkretnya, kebijakan Pemerintah menunda kenaikan harga BBM jenis Premium dan adanya subsidi untuk jenis Solar dinilai sebagai salah satu faktor penentu terjadinya inflasi.

Salah satu dari dua faktor utama

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, seperti Pertamina yang dilakukan PT Pertamina (Persero) akan menekan inflasi tahun ini yang diproyeksikan 3,5%. Ekonom *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, kenaikan harga BBM akan menjadi satu dari dua faktor utama yang mempengaruhi inflasi hingga akhir tahun. Faktor lainnya adalah depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

Menurut dia, dua kombinasi ini tentu akan menekan daya beli masyarakat. Namun, ada kemungkinan hanya daya beli masyarakat perkotaan yang tergerus akibat kebijakan ini, mengingat BBM non subsidi sebagian digunakan oleh masyarakat perkotaan. Namun, kenaikan harga BBM bisa jadi signifikan jika pergerakan harga di kelompok pengeluaran konsumen yang lain terbilang stabil.

Berkaca pada Februari silam, data BPS menunjukkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk kelompok transportasi, jasa keuangan, dan komunikasi meningkat 0,28% akibat kenaikan harga BBM non subsidi. Ini menjadi salah satu penyebab utama inflasi Februari 2018 yang mencapai 0,99%.

"Kalau memang segmented di kota besar, tentu dampaknya ke inflasi cukup signifikan. Apakah dinamikanya sama di kota lain? Itu juga perlu diperhatikan," jelasnya.

Sebetulnya, dampak inflasi yang cukup besar akan terjadi jika harga BBM bersubsidi dinaikkan. Sebab, BBM bersubsidi, seperti Solar akan digunakan untuk distribusi, sedangkan BBM non subsidi lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kendati demikian, ia tak bisa memprediksi angka pasti inflasi akhir tahun setelah kenaikan BBM dilakukan.

"Memang untuk inflasi, sejauh ini kenaikan BBM bersubsidi yang punya dampak cukup besar," ungkap Eko.

Untuk menjaga daya beli, ada kemungkinan masyarakat pengguna BBM non subsidi akan kembali beralih menggunakan BBM yang harganya diatur Pemerintah, seperti Premium. Hanya saja, saat ini akses untuk mendapatkan Premium disebut terbatas sehingga masyarakat mau tak mau harus menggunakan Pertamina atau Peralite.

Selain itu, ia menaksir pelemahan daya beli karena kenaikan BBM non subsidi akan lebih dirasakan oleh masyarakat dengan golongan pendapatan kelas menengah.

Sebab, untuk golongan masyarakat kelas atas, kenaikan harga BBM mungkin tak sebanding dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh. Sementara itu, untuk golongan masyarakat bawah, Pemerintah bisa mengompensasi kenaikan harga BBM dengan bantuan Pemerintah agar daya belinya tetap terjaga, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sebab, kelas menengah relatif tidak dapat kompensasi atas kenaikan harga BBM dalam aspek yang lain. Kalau masyarakat berpendapatan bawah ini sudah ada bantuan dari Pemerintah," terang dia.

Menjadi stabilisator terbaik

Terkait hal ini, Pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar hingga akhir tahun ini. Beberapa jenis BBM selain Premium dan Solar tetap disesuaikan dengan kondisi harga minyak mentah dunia yang mengalami kenaikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

"Intinya gini, Pemerintah tidak merencanakan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat," ujar Jonan di kantornya, Selasa (4/9/2019).

Seperti yang diketahui, nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Bahkan nilai rupiah terhadap dolar AS sempat menyentuh kisaran Rp14.800.

Defisit transaksi berjalan kuartal II/2018 menyentuh angka 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar US\$8 miliar. Penyebab utama kenaikan defisit transaksi berjalan tersebut, yakni penurunan surplus neraca perdagangan non migas di tengah kenaikan defisit neraca perdagangan migas.

Surplus neraca perdagangan non-migas pada kuartal II/2018 hanya sebesar US\$3 miliar. Kondisi tersebut sejalan dengan peningkatan defisit neraca perdagangan migas sebesar US\$2,7 miliar.

"(Inflasi terjaga) karena kemampuan Pemerintah menekan harga bahan pokok. Jadi, supply-nya ada. Juga tidak ada kenaikan harga BBM, kan batal dinaikkan. Itu saya kira jadi stabilisator yang paling baik," kata pengamat ekonomi sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko belum lama ini.

Menurut Agustinus, keputusan Pemerintah yang menunda kenaikan harga BBM membuat harga-harga bisa terjaga. Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat mengumumkan untuk menaikkan harga BBM jenis Premium. Namun, belakangan dibatalkan karena mempertimbangkan Pertamina yang disebut belum siap.

Terhadap faktor lain yang sifatnya eksternal, seperti depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah, disebut tidak terlalu berdampak pada peningkatan inflasi. Jika ada, Agustinus melihat dampaknya tidak terlalu besar dalam mendorong kenaikan harga-harga barang.

"Tentu saja barang-barang yang ada komponen impor, cost-nya akan naik. Tapi, price-nya mungkin agak naik sedikit. Tidak sebanyak depresiasi nilai tukar, kalau depresiasi nilai tukar 10 atau 15%. Ini di bawah itu, katakanlah 5 atau 7%," tutur Agustinus.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton H. Gunawan memperkirakan salah satu tantangan kondisi ekonomi domestik tahun 2019 dari tingkat inflasi yang bisa mencapai 4,5%. Salah satu faktor pendorong signifikan dari besaran inflasi itu, yakni penyesuaian harga BBM oleh Pemerintah.

Turun tangan langsung

BPH Migas sendiri bertindak langsung terhadap naik-turunnya harga BBM yang terjadi langsung di lapangan. Hal ini bisa dilihat saat harga Peralite di Riau melonjak beberapa waktu lalu. Bila dibiarkan, tak tertutup kemungkinan lonjakan harga ini bisa meluas dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Anggota Komite BPH Migas Hendry Ahmad mengatakan, ada gejolak harga BBM di Riau yang dipicu oleh sulitnya memperoleh Premium dan perbedaan harga Peralite yang lebih mahal dibanding di wilayah lain.

"Ada gejolak seperti di Riau. Pertama, Premium sulit didapat di SPBU. Kedua, Peralite mahal dibanding provinsi tetangga," kata Hendry di Kantor BPH Migas beberapa waktu lalu.

Menurut Hendry, faktor yang membuat harga Peralite di Riau lebih mahal ketimbang wilayah lain adalah besaran pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau lebih besar dibanding wilayah lain. Di Riau, tarif PBBKB mencapai 10%, sedangkan wilayah lain 5%.

"Sebagai tambahan, Peralite lebih mahal disebabkan PBBKB di Riau lebih tinggi dibanding provinsi lain," ujarnya.

Lebih jauh, kata dia, BPH Migas akan turun tangan mengevaluasi pengenaan tarif PBBKB, dengan melakukan diskusi bersama Pemerintah Provinsi Riau, DPRD, dan Pertamina.

"Ini kita sudah bicara dengan Pemprov Riau dan DPRD untuk mengevaluasi PBBKB non subsidi," jelas Hendry.

Sementara itu, Pertamina menjelaskan penyebab lebih tingginya harga BBM non subsidi jenis Peralite di Riau ketimbang di Papua dan Papua Barat. Area Manager Sumatera Communication & Relations Pertamina Sumatera Bagian Utara Rudi Ariffianto mengungkapkan, penyebab harga Peralite di Riau menempati jajaran tertinggi ketimbang wilayah lain diakibatkan pungutan PBBKB yang dimasukan dalam komponen harga Peralite sebesar 10%. "PBBKB di Riau 10%," kata Rudi.

Rudi melanjutkan, di provinsi lain, pungutan PBBKB hanya sebesar 5% daripada harga dasar BBM. Kondisi ini membuat harga Peralite di Riau lebih mahal dibanding Provinsi lain. Untuk diketahui penetapan besaran PBBKB merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah (pemda).

"Kalau di daerah lain hanya 5%. Tapi, itu kewenangannya pemda," tutur Rudi.

Untuk diketahui, struktur pembentukan harga BBM selain PBBKB di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan margin badan usaha dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). ★

Tak sekali-dua kali, BPH Migas menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU yang disinyalir melakukan praktik kecurangan. Tak jarang pula dalam inspeksi tersebut BPH Migas menemukan langsung praktik yang merugikan konsumen pengguna BBM.



BPH Migas Tindak Tegus SPBU yang Rugikan Konsumen

Respon langsung dari laporan masyarakat

Hal ini, misalnya, terkuak saat BPH Migas, Komisi VII DPR RI, dan Bareskrim Polri melakukan sidak ke SPBU yang ada di Bangka Belitung, Kamis (1/11/2018). Anggota Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar yang turut serta dalam inspeksi tersebut menyampaikan, banyak laporan masuk ke BPH Migas pusat terkait kelangkaan dan penyalahgunaan BBM, khususnya yang bersubsidi di Bangka Belitung.

"Dari laporan masyarakat kita datang ke Babel untuk melakukan sidak langsung dan diinisiasi juga oleh Komisi VII DPR RI yang membidangi ESDM," kata Ibnu.

Hasil ini, kata Ibnu akan disampaikan ke pusat untuk ditindaklanjuti. Kemudian sidak juga dilakukan untuk memantau langsung ketersediaan BBM untuk masyarakat di Bangka Belitung.

Kepada masyarakat, dia juga menyampaikan, bila melihat atau mendengar adanya penyalahgunaan BBM dapat melaporkan ke BPH Migas atau Komisi VII DPR RI atau juga pihak Pertamina.

Diakui, laporan dari masyarakat yang masuk ke BPH Migas dari masyarakat bermacam-macam. Ada

disebutkan terjadi kelangkaan BBM di Babel, ada juga dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM.

"Dari data yang ada di kami sampai September kuota BBM yang sudah terealisasi 77%. Artinya sekitar 23% lagi itu masih cukup banyak dan ini harus kita lakukan pemantauan agar tidak diselewangkan," imbuh Ibnu.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Eko Wijaya mengatakan, selain melakukan sidang tim juga melakukan proses terra ke SPBU. Dikhawatirkan jumlah BBM yang dikeluarkan dari mesin berkurang.

"Jadi jangan sampai masyarakat kita juga rugi membeli BBM dari SPBU. Makanya kita bersama tim juga melakukan terra agar BBM yang keluar dari mesin sesuai yang dibayarkan masyarakat," kata Eko Wijaya.

"BBM solar ini rawan penyelewengan, padahal ini untuk kepentingan masyarakat. Kita ingin BBM bersubsidi ini tepat sasaran bukan malah diselewangkan atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sementara dari hasil sidak dilakukan di lapangan, tim gabungan juga menemukan ada kendaraan yang

membeli dari SPBU secara berlebihan dan menggunakan peralatan tak sesuai maka akan ditindak tegas.

“Tadi kita temukan adanya tangki modifikasi. Temuan ini akan kita laporkan agar SPBUnya diberikan tindakan tegas. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Kasihan masyarakat mengeluhkan tidak adanya BBM bersubsidi,” kata Ibnu.

Keuntungan hingga Rp2 miliar

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membongkar praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum pengelola SPBU. Setidaknya ada dua SPBU yang terbukti mengurangi takaran BBM menggunakan alat canggih, yakni di kawasan Ciputat dan daerah Tangerang Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, penyelidikan itu berawal dari keluhan masyarakat yang merasa ada kejanggalan di dua SBPU tersebut. Hasil penyelidikan, petugas menemukan alat di mesin diapenser yang berfungsi mengurangi

takaran BBM alias tidak sesuai dengan digital meter.

“Alat ini merupakan komponen yang ditempatkan di dalam mesin dispenser yang berfungsi memperlambat daya arus listrik mengakibatkan putaran mesin menjadi lambat sehingga isi BBM yang keluar dari *nozzle* tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada layar,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

SPBU ‘nakal’ itu rata-rata mengurangi takarannya antara 400 ml sampai dengan 1.245 ml dalam setiap 20 liter. Alat itu bekerja sesuai kontrol seseorang melalui perangkat komputer, mereka akan mengembalikan pada kondisi normal saat ada petugas Pertamina maupun kepolisian yang datang mengontrol.

“Kalau yang di Depok malah menggunakan remote untuk mengendalikan alatnya. Kalau ada petugas datang langsung dipencet dari jarak jauh sehingga normal kembali,” imbuhnya.

Khusus SPBU di Tangerang Selatan diketahui telah melakukan praktik tersebut sejak 2017

dengan total keuntungan berkisar Rp930 juta. Sedangkan SPBU yang di Ciputat dilakukan sejak tiga tahun silam dengan jumlah total keuntungan kurang lebih mencapai Rp2 miliar lebih.

Berkaitan dengan kasus itu, ada sebanyak 11 tersangka yang dijaring polisi, tujuh pelaku berinisial AIS, AR, DT, TR, MS, H dan T ditangkap sebuah SPBU Tangerang Selatan, sedangkan empat tersangka berinisial RLN, SHD, AY dan AN dituduh di SBPU Ciputat. Polisi masih memburu dua tersangka lainnya, yakni DS dan KML.

“Tersangka yang ditangkap sesuai dengan peran asing-masing, mulai dari manajer operasional, manajer pengawasan, hingga petugas pompa bensinya,” kata Argo.

Masing-masing tersangka dijerat Pasal 8 Ayat 1 huruf b dan c, Pasal 9 Ayat 1 huruf d juncto Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31 juncto Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lega juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. ★



Mengoptimalkan Pemanfaatan Data Konsumsi

Data konsumsi pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) penting untuk menunjang kelancaran distribusi BBM secara tepat. Data yang tumpang tindih atau bahkan tidak akurat dapat mengganggu pasokan BBM untuk suatu wilayah. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam pendistribusian BBM.



Hal inilah yang coba diatasi dari kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan BPH Migas. Kerja sama yang dimaksud berupa pemanfaatan data konsumsi konsumen pengguna BBM di Riau.

Bentuk sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah

Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk ditekenya nota kesepahaman (MoU) bersama di Balai Dang Merdu, Gedung Bank Riau Kepulauan Riau (BRK), Rabu (17/10/18). Dari Pemprov Riau langsung dihadiri

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) Wan Thamrin Hasyim. Sementara itu, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa hadir langsung untuk menandatangani perjanjian kerja sama tersebut. Penandatanganan MoU ini disaksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Indra Putrayana, Kepala BRK Irvandi Gustari serta berbagai pejabat lainnya.

"MoU ini dalam rangka efisiensi pertukaran data konsumsi pengguna dan pendistribusian BBM antara Pemprov Riau dengan BPH Migas," kata Fanshurullah Asa.

Dijelaskannya, kesepakatan bersama ini adalah bentuk sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk tujuan kesepakatan MoU untuk mengoptimalkan pemanfaatan data konsumsi pengguna dan distribusi BBM.

Kemudian, meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), perencanaan penentuan alokasi kuota volume jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan, serta meningkatkan penerimaan iuran badan usaha dari jenis BBM umum.

Lanjut Fanshurullah, berdasarkan data distribusi BBM di Riau saat ini terdapat empat Badan Usaha (BU) pemegang izin usaha penyimpanan BBM dengan jumlah tangki 63 dan kapasitas 154.000 kiloliter. Sedangkan badan usaha pemegang izin usaha pemegang izin usaha niaga BBM berniaga di Riau yang semula 2017 sebanyak 25 BU, 2018 menjadi sebanyak 16 BU. Sedangkan jumlah penyalur mulai dari APMS, SPBB, SPBU, Kompak, SPBU mini, dan SPDN total sebanyak 208.

Di sisi lain, realisasi JBT dan JBKP terhadap kuota BBM relatif aman atau tidak mengalami over kuota. Namun demikian tentu perlu kerja sama seluruh pihak agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat berjalan dengan baik. Objek pertujaran data yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi berdasarkan. Kesepakatan bersama meliputi data badan usaha Wajib Pungut (WP) yang melakukan pendistribusian di wilayah Riau serta data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian BBM selama 12 bulan.

Dongkrak pendapatan daerah

Dengan kerja sama ini, pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Selatan (Sumsel) bisa meningkat karena terwujudnya keterbukaan informasi data konsumsi BBM. Alasannya, dengan adanya keterbukaan tersebut pendapatan daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) bisa diketahui dengan tepat.

"Palembang ini PAD kendaraannya baru Rp700 miliar, ini padahal potensinya besar untuk dinaikan. Dengan PBBKB bisa saja sampai Rp2 triliun," jelas Fanshurullah Asa.

Namun untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut ada syarat

yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah badan usaha yang menjadi penyalur migas di Sumatera Selatan harus melaporkan data konsumsi minyak dan gas kepada BPH Migas dengan benar.

"Badan usaha migas yang ada di Sumsel ini enggak boleh bohong, mereka mesti kasih data ke BPH Migas dan Pemda apa adanya, berapa jualnya," tambah dia.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Engeng Muhaibah pun yakin PBBKB Sumsel dapat meningkat dengan adanya data konsumsi BBM yang akurat melalui BPH Migas.

"Selama berpuluh-puluh tahun ini kan untuk PBBKB itu *self assessment*, jadi cuma menerima berapa yang disetorkan perusahaan yang kita terima. Dengan adanya MoU ini, kami bisa memperoleh data yang sebenarnya melalui BPH Migas, berapa penjualan dari perusahaan-perusahaan minyak ke konsumen," tegasnya.

Adapun dengan nota kesepahaman ini diharapkan tidak ada lagi perbedaan data dari badan usaha migas di Sumsel untuk diberikan kepada BPH Migas dan juga Pemda.

"Jika berhasil, ini akan menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia," tutur Fanshurullah Asa.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noordin mengapresiasi penuh atas nota kesepahaman tersebut dalam rangka membantu Pemerintah untuk memberikan data yang pasti dan akurat terkait penggunaan konsumsi BBM ini di Sumsel.

"Ini menunjukkan tata kelola yang mengedepankan kepentingan bagi masyarakat sekaligus bertujuan menjaga kepentingan nasional RI," tandasnya.

Berguna dalam skala global

Masih terkait data konsumsi BBM, Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Hubla Kemenhub RI menerbitkan surat edaran tentang pembatasan kadar sulfur (belerang) pada BBM kapal dan kewajiban pelaporan konsumsi BBM pada kapal berbendera Indonesia.

Pembatasan kadar sulfur BBM sebesar 0.5 persen m/m mengacu pada konvensi IMO

MARPOL Annex VI Regulasi 14. Regulasi IMO yang disebut Global Sulphur Cap ini berlaku sejak 1 Januari 2020. Kapal berbendera Indonesia yang berlayar internasional harus menggunakan BBM dengan kadar sulfur maksimal 0.5 persen, dan 0.1 persen di perairan ECA (Emission Control Area). Alternatifnya, menggunakan scrubber atau teknologi. Sementara untuk pelayaran domestik, kapal berbendera Indonesia diperbolehkan menggunakan BBM dengan kadar sulfur hingga 3.5 persen.

Pada Surat Edaran tertanggal 1 November 2018 tersebut, Pemerintah juga menerapkan aturan penggunaan energi dan bahan bakar kapal secara lebih ketat dengan mengacu pada konvensi MARPOL Annex VI Regulasi 22 dan 22A.

Dengan merujuk IMO MARPOL Annex VI Regulasi 22 tentang *Ship Energy Efficiency Management Plan* (SEEMP), setiap kapal berbendera merah putih diwajibkan memiliki buku rencana manajemen efisiensi energi. Aturan ini diberlakukan 31 Desember 2018.

Sementara dengan berlandas pada IMO MARPOL Annex VI Regulation 22A tentang *Collecting and Reporting of Fuel Ship Oil Consumption*, mulai 1 Januari 2019 pemerintah mewajibkan setiap *ship owner/operator* untuk mengumpulkan data penggunaan BBM dan melaporkan jumlah konsumsi tahunan BBM kapalnya. Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2019 terhadap kapal berbendera Indonesia berbobot 5.000 GT atau lebih.

Aturan wajib lapor konsumsi BBM pada kapal diterapkan IMO sebagai cara untuk mengetahui secara persis jumlah konsumsi bahan bakar kapal di seluruh dunia. Data tersebut berguna bagi IMO dalam mengambil kebijakan yang mendukung reduksi emisi gas rumah kaca dari industri pelayaran dunia, yang merupakan komitmen IMO dan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, terhadap Paris *Agreement*.

Dengan kata lain, data konsumsi BBM tak hanya bisa bermanfaat dalam lingkup lokal, melainkan juga global. ★

Tambah Lagi, Tiga Titik Penyalur Program BBM Satu Harga Resmi Beroperasi



Titik penyalur Program BBM Satu Harga bertambah tiga setelah BPH Migas meresmikannya, Kamis (2/8). Ketiga titik penyalur tersebut berada di Kabupaten Asmat, Papua; Kabupaten Nias, Sumatera Utara; dan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Penandatanganan prasasti peresmian ini dilaksanakan oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Direktur Infrastruktur Migas Alimudin Baso, Anggota Komisi VII DPR-RI Tjatur Sapto Edy, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Theis, dan Manajer Retail PT Pertamina (Persero) Fanda Chrismianto.

Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara Nasional memberi Amanah kepada BPH Migas sebagai Badan yang ditugasi untuk mengawal agar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan harga yang sama.

BBM Satu Harga ini adalah bukti begitu besarnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakatnya. Selain itu, dalam implementasi program BBM Satu Harga di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nias ini, BPH Migas berharap setiap pihak antara lain pemerintah daerah, pengusaha, dan Pertamina dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dalam menciptakan sistem yang dapat memudahkan masyarakat agar mudah mendapatkan BBM secara adil.

Berikut adalah beberapa informasi tambahan mengenai ketiga titik penyalur BBM tersebut:

- Titik penyalur Kabupaten Asmat berada di Distrik Fayit. Jumlah penduduk Kabupaten Asmat sekitar 94.227 jiwa. Harga BBM sebelum ada titik penyalur berkisar Rp20 ribu sampai Rp40 ribu per liter. Kini, harga BBM di sana sama dengan daerah-daerah lainnya, yakni Rp6.450 per liter.
- Titik penyalur Kabupaten Sula berada di Desa Waiboga, Sulawesi Tengah. Kabupaten Sula berpenduduk sekitar 132.524 jiwa. Harga BBM di kabupaten

tersebut sebelum adanya titik penyalur berkisar Rp15 ribu yang kini menjadi Rp6.450 per liter.

- Titik penyalur di Kabupaten Nias berada di Desa Somi, Gido. Jumlah penduduk di kabupaten tersebut tercatat sekitar 127.120 jiwa. Harga BBM di wilayah itu adalah Rp8.000/liter sebelum titik penyalur beroperasi.

Dengan jumlah 353,871 Jiwa di tiga titik lokasi tersebut, berharap masyarakat di wilayah-wilayah tersebut lebih sejahtera dan sekaligus mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ★



Persiapkan Pedoman Kewajiban Iuran, BPH Migas Gelar *Public Hearing*

Dalam rangka mempersiapkan pedoman kewajiban iuran, BPH Migas menyelenggarakan *public hearing* terkait Rancangan Peraturan Kepala BPH Migas tentang Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Iuran Badan Usaha di Hotel Aston Sentul, Senin (6/8).

Ke depannya SOP Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Iuran Badan Usaha akan dijadikan pedoman pihak BPH Migas dan Badan Usaha dalam memberlakukan kewajiban iuran. Dalam SOP tersebut akan diatur secara rinci berbagai hal, mulai dari ketentuan perhitungan besaran iuran hingga penetapan sanksi bagi pihak yang tidak dapat melunasi kewajiban iuran. ★



BPH Migas Adakan Serangkaian *Achievement Motivation*

Di dunia kerja, motivasi perusahaan atau organisasi harus berjalan beriringan karena sangat penting bagi kemajuan organisasi maupun juga karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, BPH Migas menyelenggarakan serangkaian *Achievement Motivation* bagi pegawai di lingkungan BPH Migas.



Sesi teranyar *Achievement Motivation* bertempat di Aula BPH Migas, Jakarta, Selasa (2/10) dengan narasumber. Sejumlah *Achievement Motivation* lainnya berlangsung pada Jumat (7/9) dengan nara sumber Staf Ahli Kementerian ESDM Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Prahoro Yulijanto Nurtjahyo; dan Kamis (23/8) dengan narasumber Staf Ahli Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi. ★



BPH Migas Gelar Serangkaian Sosialisasi Perpres 43 Tahun 2018

BPH Migas menggelar serangkaian sosialisasi Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Sosialisasi ini menjadi bagian tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengatur dan mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI.



Salah satu sosialisasi yang dimaksud berlangsung di The Sun Hotel, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (8//10). Pada kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal membuka rangkaian acara sosialisasi yang diisi oleh beberapa narasumber antara lain Anggota Komisi VII DPR RI Syaikul Islam, Anggota Komite BPH Migas Hari Pratoyo, dan Biro Hukum Kementerian ESDM Putri Fikdiani.

Dalam sambutannya, Ahmad Rizal mengatakan, "Kesempatan ini kami harapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi dalam memberikan segala informasi terkait bagaimana pelaksanaan pendistribusian BBM dan sejauh apa ketersediaannya, khususnya adalah Jenis

BBM Khusus Penugasan (Premium) di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang akan menjadi input penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengatur dan mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM".

Sebelumnya, pada Rabu (3/10), acara serupa juga berlangsung di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, Komite BPH Migas Lobo Balia, Komite BPH Migas Ibnu Fajar, sejumlah perwakilan dari Komisi VII DPR RI dan Pertamina turut hadir.

Acara sejenis juga diadakan pada bulan September. Lebih tepatnya pada Rabu (26/9) di Villa Kuning, Kabupaten Lebak, Banten. Turun Hadir pada acara tersebut

antara lain Komite BPH Migas M. Lobo Balia dan Anggota Komisi VII DPR RI H. Anda.

Pada bulan yang sama, acara serupa juga berlangsung di Hotel Royal Bogor, Jawa Barat. Acara yang berlangsung Senin (10/9) ini turut dihadiri oleh Komite BPH Migas Jugi Prajogio, Komite BPH Migas M. Lobo Balia, Anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Bogor Sinaga, dan Perwakilan Marketing Operation Region III PT Pertamina (Persero) Nurhadi. Dalam sosialisasi kali ini, Jugi Prajogio menyampaikan bahwa wilayah penugasan distribusi BBM Jenis Bensin RON 88 meliputi seluruh wilayah NKRI, kecuali di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali (Jamali). Namun, pada Perpres No. 43/2018, Menteri ESDM dapat menetapkan distribusi BBM jenis Bensin RON 88 di wilayah penugasan yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1.851 K/15/MEM/2018 yang menetapkan Jamali sebagai wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan.

Serangkaian sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi terkait dengan berbagai kebijakan BBM kepada masyarakat, khususnya pengguna BBM di wilayah Jamali. ★



Sinergikan Kebijakan, BPH Migas Gelar *Public Hearing* Perubahan Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012

Guna menyinergikan peraturan yang akan dikeluarkan, BPH Migas menggelar *public hearing* tentang perubahan peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012 akhir September lalu. Perubahan kebijakan tersebut terkait pedoman penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.



Kegiatan ini dibuka oleh Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjono mewakili Kepala BPH Migas. Narasumber dari Komite BPH Migas dalam acara tersebut adalah Ibnu Fajar. Turut hadir pada kesempatan sama perwakilan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kemenkumhan, Kemensos, Sekda Provinsi dan Kabupaten di wilayah Indonesia, PT Pertamina (Persero), PT AKR, dan Hiswana Migas juga berpartisipasi dalam acara tersebut.

Public hearing bertujuan agar BPH Migas mampu menyinergikan peraturan yang akan dikeluarkan oleh BPH Migas dengan tata operasional pelayanan bahan bakar minyak kepada konsumen pengguna sesuai Perpres 191 Tahun 2014 yang dilaksanakan

oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal ini dimaksudkan supaya pelayanan BBM

kepada konsumen pengguna dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memberikan pedoman penerbitan surat rekomendasi. ★



BPH Migas menggelar forum diskusi hukum dalam menyelesaikan sengketa (*dispute resolution*) di bidang hilir migas yang bertempat di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Kamis (20/9). Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam sambutannya mengatakan bahwa diskusi ini dilakukan demi memberikan nilai tambah bagi BPH Migas ke depan. Sebab, dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan Pemerintah dalam mengawal minyak dan gas bumi secara nasional, perlu ada langkah hukum yang tegas, jelas, dan efektif.

Kepala BPH Migas menegaskan bahwa BPH Migas memiliki tanggung jawab dalam memberikan alternatif penyelesaian sengketa di bidang hilir migas. Pasalnya, di sektor hilir migas ada sekitar 200 badan usaha yang memiliki izin niaga umum dan di sektor jaringan transmisi dan pipaniasi gas bumi ada sekitar 50 badan usaha yang memiliki izin di bidang pipaniasi dan transmisi.

Dari begitu banyaknya badan usaha yang memiliki usaha niaga umum maupun izin transmisi dan pipanisasi tersebut, kemungkinan akan seringkali terjadi sengketa di bidang hilir dan gas bumi. Maka, diharapkan ada solusi yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa di hilir migas.

Kegiatan Forum Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Profesor

Rosa Agustina dari Universitas Indonesia, Profesor H. Adolf dari Universitas Padjajaran dengan Moderator Komite BPH Migas Ahmad Rizal dan Kepala Bagian Hukum dan Humas BPH Migas Ady Mulyawan R.

Forum Diskusi ini diharapkan dapat memberikan input yang besar terkait dengan solusi hukum yang dapat menjadi sebuah alternatif dalam penyelesaian sengketa di bidang hilir minyak dan gas bumi. ★

BPH Migas Gelar Diskusi Penyelesaian Sengketa di Bidang Hilir Migas



Teluk Bintuni Jadi Titik BBM Satu Harga ke-14 di Papua

SPBU-N Bintuni menjadi titik BBM Satu Harga ke-14 yang hadir di Papua setelah diresmikan pada Rabu (12/9). Tahun ini, Pemerintah menargetkan 73 titik BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.



BPH Migas dan Kepolisian RI Jalin Kerjasama

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Kapolri Tito Karnavian menandatangani Nota Kesepahaman antara BPH Migas dan Kepolisian RI di Jakarta, Senin (17/9). Penandatanganan Nota Kesepahaman ini demi mewujudkan sinergitas dalam pengamanan dan penegakan hukum terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Ditemui pada kegiatan ini, Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa mengatakan, "BBM bersubsidi yang diamankan melalui APBN pada tahun 2018 berjumlah kurang lebih 15,6 juta KL, belum termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan, seperti Premium. Kesepakatan ini kami harapkan dapat membantu BPH Migas untuk mengamankan dan menegakkan hukum agar subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat".

MoU atau Nota Kesepahaman antara BPH Migas dan Kepolisian RI ini akan berlaku selama tiga tahun ke depan dan akan segera disusun pedoman kerja yang lebih lanjut. ★

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini juga termasuk kepada ranah percepatan pemberlakuan BBM Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara nasional meliputi:

- a. Tukar menukar data dan/atau informasi
- b. Pengawasan
- c. Pembinaan kesadaran hukum
- d. Pengamanan
- e. Penegakan hukum
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia



Anggota Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia menuturkan, ke-73 penyalur BBM Satu Harga tersebut dengan perincian 67 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan enam penyalur PT AKR Corporindo, Tbk.

Lobo Balia menjelaskan, BPH Migas adalah badan yang mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas

bumi melalui pipa dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.



la menambahkan, ke depan sektor hilir akan mulai semakin digenjut produktivitasnya, mengingat antara jumlah pasokan di hulu dan jumlah produksi di hilir terdapat gap yang terbilang cukup jauh.

"Tampaknya, hilirnya akan lebih banyak sebab sekarang konsumsi BBM kita saja sudah 1,8 juta barel per hari. Sementara produksi hulu hanya mampu menyediakan sebesar 600 ribu barel," imbuh dia. ★

Kini, Giliran Masyarakat Kabupaten Lamandau Rasakan BBM Satu Harga

Komite BPH Migas Hari Pratoyo turut meresmikan SPBU di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Kamis (13/9). Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Pj Bupati Kabupaten Lamandau H. M. Katma F. Dirun dan Marketing Branch Manager Kalbarteng PT Pertamina (Persero) Teuku Johan Miftah.

Pemerintah saat ini melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara Nasional memberi amanah kepada BPH Migas sebagai Badan yang ditugasi untuk mengawal agar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan harga yang sama.

BBM Satu Harga ini adalah bukti begitu besarnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakatnya. Selain itu, dengan terealisasinya program BBM Satu Harga di Kabupaten Lamandau ini diharapkan setiap pihak antara lain pemerintah daerah, pengusaha, dan Pertamina dapat senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi untuk memudahkan masyarakat setempat mendapatkan BBM secara adil dengan harga sesuai ketentuan Pemerintah.

Kuota volume JBT tahun 2018 untuk Kabupaten Lamandau sebesar 4.143 kiloliter (kl) untuk Minyak Solar dan 300 kl untuk Minyak Tanah. Sedangkan alokasi Volume JBKP untuk Kabupaten Lamandau sebesar 4.231 kl untuk Bensin (Gasoline) RON Minimum 88. ★



Titik BBM Satu Harga ke-69 Hadir di Lalan

Titik BBM Satu Harga ke-69 hadir di Lalan setelah diresmikan Jumat (7/9). Turut hadir dalam peresmian titik BBM di Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tersebut di antaranya Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa beserta Komite BPH Migas Ahmad Rizal dan perwakilan dari pemerintah daerah serta PT Pertamina (Persero).

Penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Lalan ini mendistribusikan Jenis BBM Premium dan Solar bagi masyarakat sekitar Lalan yang sebelumnya masyarakat harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli BBM dengan dibanderol sebesar Rp12.000 untuk Jenis BBM Premium begitu juga dengan Solar yang dijual dengan harga Rp8.500-10.000. Namun kini setelah hadirnya SPBU Kompak No. 26.307.29 ini, masyarakat dapat merasakan dan menikmati keadilan harga BBM yang sama dengan Pulau Jawa, yaitu Rp6.450/liter untuk Premium dan Rp5.150/liter untuk Solar.

Ditemui di lokasi peresmian, M. Fanshurullah Asa mengatakan, "Penyalur BBM Satu Harga ini harus tepat sasaran kepada rakyat kecil dan kami mengharapkan agar pemerintah daerah beserta masyarakat Musi Banyuasin ikut serta mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM di tingkat penyalur satu harga ini agar tidak disalahgunakan".

"Selain itu, kami berharap dengan kehadiran Penyalur BBM Satu Harga ini akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar," tambah Fanshurullah. ★

BBM Satu Harga Hadir di Katingan

Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Nikodemus, Kapolres Katingan AKBP E. Dharma Ginting, dan PT. Pertamina (Persero) yang diwakili oleh SE Retail Kalimantan Anditya Anwar meresmikan salah satu lembaga penyalur BBM Satu harga Pertamina di Katingan, Kalimantan Tengah, Senin (10/9). Peresmian SPBU 66744002 ini bertempat di Desa Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Patuan Alfon dalam sambutannya menyampaikan, SPBU ini adalah titik penyalur Program BBM Satu Harga yang ke-72 yang diresmikan dari total lembaga penyalur BBM satu harga sejak tahun 2017.

"Penyalur BBM satu harga ini diharapkan dapat mendistribusikan Jenis BBM Premium dan Solar dengan harga yang sama yaitu Rp6.450/liter untuk Premium dan Rp5.150/liter sehingga masyarakat Kecamatan Katingan Kuala dapat menikmati harga BBM sama seperti Harga BBM di pulau Jawa," tambah Patuan Alfon.

Bagi masyarakat sekitar Katingan Kuala kehadiran SPBU BBM satu harga dirasa sangat bermanfaat karena menurut informasi dari masyarakat sebelum adanya penyalur BBM Satu Harga ini, masyarakat harus mengeluarkan uang sebesar Rp20.000/liter untuk Premium dan Rp14.000/liter untuk Solar di tingkat pengecer. Namun kini masyarakat Katingan dapat merasakan keadilan yang sama dengan Pulau Jawa dan pulau-pulau besar lainnya. ★



Giliran Masyarakat Gorontalo Utara Nikmati BBM Satu Harga

Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar turut meresmikan penyalur Program BBM Satu Harga di Tolinggula, Gorontalo Utara, Kamis (6/9). Acara Peresmian ini juga dihadiri oleh Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Wakil DPRD Kabupaten Gorontalo Utara serta pejabat PT Pertamina (Persero) setempat.

SPBU Kompak yang terletak di Kecamatan Tolinggula (76-965-01) ini merupakan penyalur BBM Satu Harga ke-22 di tahun 2018. SPBU Kompak ini memiliki kapasitas storage sebesar 5 kl untuk Jenis BBM Premium dan 5 kl untuk Jenis BBM Solar yang mendapatkan pasokan BBM dari Depot Gorontalo dengan menggunakan transportasi darat (tangki truk). SPBU Kompak ini dibangun untuk dapat melayani masyarakat sekitar Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara dengan dua produk utama, antara lain Premium yang dipatok dengan harga Rp6.450/liter dan Solar Rp5.150/liter. Penjualan kedua produk tersebut dilakukan dengan menggunakan canting. ★



Penandatanganan Digitalisasi Nozzle SPBU

BPH Migas menggelar serangkaian sosialisasi Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Sosialisasi ini menjadi bagian tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengatur dan mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI.



PT Pertamina (Persero) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk bersinergi membangun sistem digital secara bertahap pada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di seluruh Indonesia. Penandatanganan PKS ini dihadiri oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/8).

Acara ini dihadiri juga oleh Menteri BUMN Rini Sumarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Staf Ahli Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol, Komisaris Utama Pertamina Tantri Abeng, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Direktur Utama Telkom Alex Sinaga

Digitalisasi *nozzle* ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SPBU Pertamina secara holistik, memperluas pengembangan bisnis lebih lanjut secara digital (digital and cashless payment, loyalty dan lain sebagainya) serta memudahkan monitoring fuel product. ★

BPH Migas mengecek dan memastikan ketersediaan BBM di Lombok, Nusa Tenggara Barat

7 Agustus 2018 Tim BPH Migas tiba di Lombok dan mengecek TBBM yang menyalurkan BBM keseluruhan penyalur diseluruh Pulau Lombok. berikut data yang diperoleh dari tim BPH Migas Stok Premium 5900KL dengan ketahanan stok 8,2 hari, Stok Solar 5902 KL dengan ketahanan stok 8,7 hari, Stok Pertamina 5820 KL dengan ketahanan stok 18,3 hari, Stok Avtur 1434 KL dengan ketahanan stok 9 hari dan Stok Pertamina dex 230 KL dengan ketahanan stok 46 hari.

Salah satu wilayah yang yang paling parah terdampak Bencana Gempa Bumi adalah Kecamatan Pemenang dan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Di wilayah tersebut untuk mendapatkan BBM masyarakat dilayani oleh SPBU 54.833.05. Terminal BBM Ampenan telah mengirimkan BBM ke SPBU 54.833.05

untuk Premium sebesar 8 KL dan Solar sebesar 8 KL.

BPH Migas akan terus berusaha memonitoring lokasi-lokasi yang terkena dampak gempa bumi di lombok, agar masyarakat tetap terpenuhi kecukupan BBM dan tercapainya energi berkeadilan. ★





BPH Migas Gelar *Workshop* Kesiapan Infrastruktur Hilir Gas Bumi

BPH Migas menyelenggarakan workshop bertema “Kesiapan Infrastruktur Hilir Gas Bumi Indonesia Menghadapi Tantangan Global” di Hotel Holiday Inn Resort Baruna, Bali, Kamis (30/8). Workshop ini digelar guna membahas arah kebijakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur hilir gas bumi, optimalisasi pemanfaatan gas bumi khususnya untuk kebutuhan dalam negeri dan juga melihat peluang, tantangan, dan kendala dalam pemanfaatan gas bumi.

kesempatan serta peluang yang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor industri gas bumi.

“Selain itu juga, kegiatan ini selaras dengan rencana BPH Migas untuk melakukan lelang ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi gas bumi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri serta meningkatkan investasi hilir migas di Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004,” tegas Fanshurullah Asa.

Workshop ini mengundang para stakeholder terkait untuk menjadi pembicara antara lain Komisi VII DPR RI, Kepala Bidang ESDM Pemerintah Provinsi Bali, Presiden Direktur Energi Nusantara Merah Putih dan lain-lain. ★

Ditemui dalam kegiatan ini, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, “Menurut Wood Mackenzie, sekitar 40 kargo LNG dalam 1 tahun diekspor keluar negeri. Padahal jika kita merujuk pada Undang-Undang Migas bahwa tidak ada batasan untuk pemanfaatan gas dalam negeri yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Hal ini karena masih adanya stigma kendala dari sisi hulu dan hilir yang menyebabkan perkembangan dunia gas bumi di Indonesia masih sulit untuk berkembang. Di sisi hulu, mengapa LNG masih dilakukan ekspor dikarenakan adalah infrastruktur hilir dalam negeri yang masih terbatas, sedangkan di sisi hilir mengapa Badan Usaha masih enggan melakukan pendanaan pembangunan infrastruktur karena belum adanya jaminan alokasi gas”.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengamanatkan kepada BPH Migas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa. Seiring dengan kebijakan pengembangan gas bumi di negara-negara kawasan ASEAN, berdasarkan data ASEAN *Center For Energy* porsi Gas Bumi dalam bauran energi ASEAN berada pada kisaran 24% terbesar kedua setelah minyak. Hal ini merupakan

Oleh karena itu, lanjutnya, workshop ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memberikan gambaran mengenai kesiapan infrastruktur hilir gas bumi di Indonesia dalam kaitannya menghadapi tantangan global dan peluang investasi pasar regional dengan mengundang para stakeholder untuk bertukar pikiran, informasi, dan apa saja yang menjadi kendala pada kegiatan hilir gas bumi.





Image: istimewa

BPH Migas Pantau Ketersediaan dan Pendistribusian BBM Pasca Musibah Gempa Lombok

Musibah gempa yang melanda Lombok masih dirasakan sampai Kamis (9/8) dengan kekuatan 6,2 SR. Meski begitu, hal ini tidak menjadi penghalang bagi Tim Pegawai BBM BPH Migas untuk terus bekerja dalam mengawasi dan memastikan ketersediaan dan pendistribusian BBM di wilayah tersebut.

Berikut hasil laporan tim pengawasan BBM per Tanggal 8 Agustus 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

- SPBU 54.833.05, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara masih belum teraliri jaringan listrik. Namun, SPBU ini sudah mulai beroperasi sejak pukul 17.30 WITA dengan menggunakan genset yang berasal dari SPBU yang lain.
- SPBU 54.833.12, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara sudah mulai beroperasi dan menyalurkan BBM Premium dan Peralite sejak pukul 16.22 WITA.

- Stok BBM per 8 Agustus 2018 di TBBM Ampenan masih dalam kondisi aman dengan rincian Premium dengan coverage days 7 hari; Solar 7,1 hari; Pertamina Dex 44,2 hari; Avtur dan 7,8 hari.

BPH Migas akan terus mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM di Lombok dan terus memastikan agar pasokan BBM di kota Lombok terus terpenuhi. ★



Penyaluran BBM Bersubsidi Capai **66,2%**



BPH Migas mengumumkan realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah mencapai 10,08 juta kiloliter (kl) hingga 27 Agustus 2018. Artinya, penyaluran BBM bersubsidi sudah mencapai 66,2 persen dari total kuota yang dialokasikan dalam APBN 2018, yakni sebesar 16,23 juta kl.

"Realisasi itu berasal dari PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. Untuk solar realisasinya 9,7 juta kl dari kuota 14,6 juta kl," kata Kepala BPH Migas Fansurullah Asa di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (28/8/2018).

"Sedangkan [penyaluran] untuk kerosene [minyak tanah] sebesar 346 ribu kl dari kuota 610 ribu kl," dia menambahkan.

Fansurullah menambahkan total kuota untuk solar bersubsidi sebetulnya 15,6 juta kl. Akan tetapi BPH Migas meminta agar 1 juta kl solar itu dicadangkan serta memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Sementara untuk BBM jenis premium, penyalurannya tercatat mencapai 5,26 juta kl. Jumlah tersebut setara dengan 44,29 persen dari total kuota untuk BBM bersubsidi jenis premium pada 2018, yakni 11,8 juta kl.

Menurut Fansurullah, total kuota itu menyesuaikan dengan area penugasan untuk BBM jenis premium. Pada awalnya, kuota premium bersubsidi hanya 7,5 juta kl. Tapi, karena ada penugasan khusus dari pemerintah ke Pertamina untuk penyaluran

premium di Jawa, Madura, dan Bali, kuota pun ditambah.

Fansurullah mengklaim tren konsumsi BBM bersubsidi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dia memperkirakan ada potensi penghematan BBM bersubsidi mendekati 1 juta kl, pada tahun ini.

"Penghematan khususnya pada solar," ucap Fansurullah. Berdasarkan data BPH Migas, dari kuota solar sebanyak 17 juta kl pada

2015, realisasinya hanya sekitar 14,1 juta kl. Sementara pada 2016, realisasinya tercatat 13,7 juta kl dari alokasi kuota sebanyak 15,5 juta kl. Pada 2017, kuotas sebesar 15,5 juta kl solar, juga terealisasi 14,5 juta kl saja.

Senada dengan tren yang terlihat pada konsumsi solar, BPH Migas juga mencatat penurunan konsumsi minyak tanah. Dalam tiga tahun terakhir, realisasinya berturut-turut sebesar 737 ribu kl (2015), 536 ribu kl (2016), dan 527 ribu kl (2017). ★



Respon Cepat BPH Migas Pantau Kondisi Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Palu dan Donggala



Palu, Donggala dan wilayah sekitar lainnya di Sulawesi Tengah diguncang gempa dan tsunami pada Jumat (28/9). Keesokan harinya, Tim BPH Migas yang langsung dipimpin oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa langsung meninjau lokasi terdampak bencana tersebut.

BPH Migas terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) dan lembaga-lembaga lainnya untuk terus mengusahakan yang terbaik terkait penyediaan dan pendistribusian BBM dalam tahap pemulihan pasca bencana.

Ditemui di lokasi, Fanshurullah Asa mengatakan, "Tim BPH Migas sejak Sabtu, 29 September 2018, satu hari setelah bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala terjadi sudah berangkat ikut mengatasi suplai BBM yang porak-poranda akibat TBBM dan beberapa SPBU hancur. Alhamdulillah, sampai hari ini sudah berangsur pulih. Depot BBM Pertamina di Donggala sudah bisa menerima BBM dari kapal tanker juga 10 dari 17 SPBU sudah beroperasi secara normal dan disiapkan





41 dispenser portable secara manual serta 12 mobil dispenser untuk mengurangi mengularnya antrean membeli BBM oleh masyarakat. Kami mengimbau masyarakat Palu dan Donggala tenang karena dapat dipastikan ketersediaan BBM aman!"

Selain itu, BPH Migas juga melarang masyarakat untuk membeli BBM melalui jerigen karena memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, terhitung Senin (8/10), BPH Migas meminta masyarakat tidak membeli BBM menggunakan jerigen dengan alasan:

- BBM yang ada di SPBU adalah diperuntukkan untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 serta kendaraan berplat kuning.
- BBM adalah bahan bakar yang mudah terbakar sehingga dapat menimbulkan kebakaran apabila masyarakat membeli dengan menggunakan jerigen dan atau media lain, seperti drum di SPBU.
- BBM yang ada di SPBU adalah diperuntukkan kepada konsumen akhir dan tidak dapat diperjualbelikan kembali.
- Pasal 18 ayat (2) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM melarang masyarakat menimbun dan atau mengumpulkan BBM dari SPBU.

Kondisi di Kota Palu, Donggala dan sekitarnya dilaporkan makin kondusif dengan sudah beroperasinya 15 dari 17 SPBU di Kota Palu, tiga dari empat SPBU di

Kabupaten Donggala, dan satu dari dua SBPU di Sigi untuk melayani masyarakat sekitar. ★



BPH Migas Evaluasi Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi kembali keekonomian proyek pipa gas Cirebon-Semarang. Tender proyek tersebut dimenangi PT Rekayasa Industri (Rekind) sejak 2006. Nyatanya, setelah 12 tahun berlalu, belum ada perkembangan berarti atas proyek pipa gas sepanjang 682 km tersebut.



Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan pihaknya sedang memfinalisasi penghitungan ulang keekonomian proyek pipa gas Cirebon-Semarang. Dia menyebutkan sejumlah parameter, seperti panjang pipa, ketersediaan pasokan gas dan calon pembeli gas, telah banyak mengalami perubahan dari estimasi awal.

Dengan sejumlah parameter tersebut maka ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan awal dengan Rekind perlu divalidasi ulang sehingga tercapai keekonomiannya.

“Sekarang ini prosesnya BPH Migas dan Rekind sedang validasi angkanya lagi, supaya bisa maju ke Wamen (Wakil Menteri ESDM) untuk dicek kembali,” ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (13/9/2018).

Apabila hasil validasi tersebut masuk akal dan disetujui oleh Kementerian ESDM, terang Jugi, maka proyek pipa Cirebon-Semarang tidak akan lama lagi dapat segera memulai kontruksinya (*groundbreaking*). “Harapannya kalau Rekind tidak akan lebih dari tahun ini,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya telah beberapa kali memanggil Rekind untuk menagih komitmen keduanya dalam membangun proyek tersebut. Rekind disebutnya telah melakukan pertemuan dengan BUMD di Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta telah sepakat bekerja sama dengan PT Pertamina Gas (Pertagas). ★

Permintaan Gas Menjadi Tantangan Terbesar Dalam Bisnis Gas

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ahmad Rizal membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam industri gas bumi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ahmad saat memberi sambutan dalam workshop bertema ‘Kesiapan Infrastruktur Hilir Gas Bumi Indonesia Menghadapi Tantangan Global’ di Bali, Kamis (30/8).

Kegiatan ini membahas arah kebijakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur hilir gas bumi, optimalisasi pemanfaatan gas bumi khususnya untuk kebutuhan dalam negeri dan juga melihat

peluang, tantangan, dan kendala dalam pemanfaatan gas bumi.

“Tantangan besar dalam bisnis gas saat ini adalah permintaan gas dalam negeri yang terus meningkat,” ujar Ahmad.

Selain itu, kondisi geologis Indonesia juga menjadi kendala dalam mengembangkan bisnis gas bumi.

BPH Migas Imbau Pemda Percepat Perizinan BBM Satu Harga

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah daerah bersinergi dalam operasional program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) Indonesia perlu mendapat prioritas.

"Titik ke-78 sudah diresmikan, tapi yang sudah uji operasi ada 114, memang karena perizinan bupatinya ini (operasional penuh) masih terkendala," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa saat meresmikan titik ke-78 BBM satu harga di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Jumat (26/10).

Fasilitas fisik yang telah ada di beberapa titik penyalur BBM satu harga saat ini masih terkendala perizinan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Selain itu, di beberapa kawasan juga pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) tak kunjung direspons pemerintah daerah setempat.

Fanshurullah mengaku telah meminta dukungan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait perizinan daerah untuk



operasional SPBU BBM satu harga. Target operasional program di 130 titik hingga 2019 ini perlu diupayakan maksimal sesuai dengan peta jalan yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.

"Nah kami imbau kepada para bupati, kami sudah pegang list-nya, saya

sudah kirim surat ke Menteri ESDM, sudah mengirim surat ke Mendagri dan tembusannya ke Presiden untuk minta dipercepat izinnya untuk dipercepat karena menyangkut kesejahteraan rakyat," ungkapnya. ★

"Dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan, ini juga cukup menyulitkan dan membutuhkan investasi infrastruktur gas yang cukup besar," kata Ahmad.

Ahmad melanjutkan, pemerintah selaku regulator juga harus membuat regulasi yang jelas agar pembangunan infrastruktur gas bumi bisa terus berkembang.

"Bahwa dalam pengembangan infrastruktur membutuhkan data informasi arah, regulasi, kebijakan yang harus jelas. Demikian pula, ketersediaan alokasi gas bumi seyogyanya dapat berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur gas bumi," ucap dia. ★





BPH Migas Segera Gelar Pra Tender untuk Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Pengangkutan Gas dan Wilayah Niaga Tertentu (WNT)

Pemerintah terus berusaha menghapus trader gas bermodal kertas. Pasalnya, trader gas jenis ini hanya membuat jaringan gas bertingkat yang akhirnya membuat harga gas ke konsumen menjadi mahal. Hal ini pun mulai diberlakukan saat pra tender untuk Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Pengangkutan Gas dan Wilayah Niaga Tertentu (WNT).

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jugi Prajogio mengatakan, sejauh ini sudah ada beberapa trader gas yang mendapatkan alokasi gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Trader gas tersebut sudah bisa mengajukan WJD dan WNT langsung ke BPH Migas.

Menurut Jugi, trader tersebut dipastikan sudah memiliki infrastruktur untuk bisa mendapatkan WJD atau WNT.

"Saya lupa berapa jumlahnya, tapi badan usaha yang memiliki infrastruktur yang tertarik untuk jadi pengelola WJD WNT," imbuhnya.

Jugi menegaskan, trader gas yang tidak memiliki infraatruktur atau hanya



bermodal kertas saja dipastikan tidak akan mendapatkan WJD atau WNT.

Merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi, izin trader gas yang tidak memiliki infrastruktur gas alias pipa gas sudah harus dicabut sejak tanggal 24 Februari 2018.

"Yang tidak punya infrastruktur tidak akan dapat WJD/WNT," ungkap Jugi, Minggu (7/10). Sejauh ini, se lain para trader gas, baru PT Pertagas Biaga yang sudah mengajukan WJD dan WNT. "PGN justru belum ajukan WJD WNT," katanya. ★

BPH Migas Masih Kaji Perubahan Desain Pipa Gas Bakrie di Kalimantan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku belum merestui perubahan desain pipa gas yang akan dibangun PT Bakrie and Brothers di Kalimantan. Ini menindaklanjuti langkah Bakrie untuk mengubah desain proyek yang dulunya bernama Kalimantan Jawa 2 (Kalija) menjadi pipa Trans Kalimantan.

Nantinya gas ini dapat didistribusikan dari Kalimantan Selatan, ke daerah lainnya. Sehingga dapat dimanfaatkan di berbagai sektor. Salah satunya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni industri Batu Licin dan Jorong, yang kemungkinan membutuhkan gas yang lebih banyak.

Setelah itu akan dibangun dari Bontang ke Banjarmasin sepanjang 52 km. Lalu ruas Natuna D Alpha ke Pontianak dengan panjang 487 km. Kemudian Pontianak ke Palangkaraya 1,018 km. Adapun, Palangkaraya ke Banjarmasin 192 km.

Pertimbangan skema itu dijalankan karena kebutuhan gas di Pulau Kalimantan cukup besar. Kebutuhan gas di Kalimantan Utara 176 MMScfd, Kalimantan Timur 212 MMScfd, Kalimantan Selatan 137 MMScfd, Kalimantan Tengah 57 MMScfd, Kalimantan Barat 149 MMScfd, dan Pulau Natuna 49,083 BSCFD.

Ada dua sumber gas yang bisa menjadi opsi. Pertama, berasal dari Lapangan Merakes yang proposal pengembangannya sudah disetujui dengan potensi gas 400 MMScfd. Ada juga dari West Badik yang memiliki gas 60 mmscdf. ★

Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan, pihaknya meminta kepada Bakrie untuk menghitung ulang proyek. Tujuannya agar proyek ekonomis dan masuk akal.

“Silakan Bakrie membuat beberapa simulasi. Nanti kalau simulasi dari sisi teknis, ekonomis, finansial cocok, kami bicarakan dan putuskan,” kata Jugi di Jakarta, Senin (8/10).

Sejauh ini Bakrie baru menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) terkait proyek pipa Kalimantan itu dengan pemangku kepentingan terkait pada bulan lalu. Artinya, Bakrie baru memetakan rencana proyek yang akan dibangun, mulai dari bentuk, kemampuan serap daerah, pasokan, keekonomian, legal, dan lahan.

Dari FGD itu, ada beberapa opsi yang muncul terkait lokasi pembangunan pipa di Kalimantan itu. Salah satunya Bakrie akan

membangun pipa dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan.

Namun untuk mematangkan opsi pembangunan pipa itu, Jugi meminta Bakrie memastikan dari segi pasar yang akan menyerap gas, dan juga dukungan daerah agar proyek bisa berjalan.

“Kami harus menggodok proyek ini dari segi kelayakan. Kalau enggak layak tidak akan kami putuskan,” kata dia.

Untuk tahap awal, rencananya pipa gas Trans Kalimantan ini akan dibangun dari Bontang, Kalimantan Timur ke Takisung, Kalimantan Selatan. Jaraknya kurang lebih 250 kilometer (km).

Pipa gas ini akan melewati tujuh kabupaten di Kalimantan Selatan. Tujuh kabupaten itu yakni Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Banjarbaru, dan Tanah Laut.



Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...



Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id